

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2006



Diterbitkan : Februari 2007
Data : Januari 2006 – Desember 2006



DINAS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENREKANG, SUL – SEL

Jl. Buttu Juppandang No. 83 ENREKANG 91711

Telp/ fax : 0420 – 21287

Email : dtrlh@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur diperhadapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenan-Nya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang ini dapat tersusun.

Penyusunan **Buku Status Lingkungan Hidup Tahun 2006** terdiri dari dua buku yaitu **Buku I** merupakan Analisis dan **Buku II** merupakan Basis Data Lingkungan Hidup. Diharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan bagi pengambil kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Status Lingkungan Hidup Daerah ini, disusun dengan menggunakan Panduan Penyusunan SLHD yang diterbitkan oleh KLH. Laporan ini diharapkan memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan secara transparan, penyebab/penekan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dampak yang terjadi serta respon Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi.

Akhirnya, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusi terhadap selesainya Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang dan lebih khusus disampaikan pula terima kasih kepada Bapak Bupati Enrekang yang selama ini memberikan perhatian yang mendalam terhadap penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang ini maupun perhatiannya terhadap berbagai masalah pengelolaan lingkungan.

Enrekang, Desember 2006

Drs. PM. Alamsyach, MS.

Kepala Dinas Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kab. Enrekang

DAFTAR ISI

RINGKASAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Issu Lingkungan Hidup	I-2
1.3. Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan	I-9
1.4. Kegiatan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Lingkungan	I-10
BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	II-1
2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	II-1
2.2. Kebijakan Tata Ruang	II-27
2.4. Kebijakan Sosial Budaya	II-28
2.5. Kebijakan Sosial Ekonomi	II-29
BAB III. ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN	III-1
3.1. Keadaan Umum	III-1
3.2. Lingkungan Alam	III-2
3.2.1. Kawasan Hutan	III-2
3.2.2. Daerah Aliran Sungai	III-5
3.2.3. Kawasan Perlindungan/Non Budidaya	III-7
3.3. Lingkungan Buatan	III-7
3.3.1. Kawasan Penambangan	III-7
3.3.2. Kawasan Pertanian dan Perkebunan	III-8
3.3.3. Kawasan Peternakan	III-13
3.3.4. Kawasan Perindustrian	III-14
3.4. Beban Pencemaran	III-14
3.4.1. Pencemaran Air	III-14
3.4.2. Pencemaran Udara	III-16
3.4.3. Pencemaran Limbah Padat	III-17
3.4.4. Degradasi Lahan	III-18
3.4.5. Keanekaragaman Hayati	III-19

3.5. Lingkungan Sosial.....	III-21
3.5.1. Sosial Budaya	III-21
3.5.2. Sosial Ekonomi	III-34
3.5.3. Program Pengendalian Dampak Lingkungan.....	III-38
 BAB IV. TINDAK LANJUT.....	 IV-1
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Hasil analisis parameter kualitas air	III-15
---	--------

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Penduduk usia sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Enrekang	III-28
---	--------

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Agenda 21.

Agenda 21 telah mengekspresikan bahwa secara global sangat penting meningkatkan pemahaman terhadap keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta resultante sebab akibatnya. Kenyataan ini menggaris bawahi pentingnya laporan pengelolaan lingkungan hidup disusun baik ditingkat lokal/daerah, nasional, regional maupun global dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang terjamin. Pada Tahun 1987 laporan Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan mengumumkan laporannya yang banyak dikenal dengan sebagai Laporan *Brundland*. Laporan itu memberi sumbangan yang besar pada pengertian tentang hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Inti konsep komisi ini adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi merata dengan

adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi. Syarat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan berwawasan lingkungan.

Penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Enrekang ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keadaan jumlah dan kualitas sumberdaya, serta tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi. Dengan cara membandingkan dengan keadaan sumberdaya saat ini dan tingkat kerusakan lingkungan tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui apakah kualitas lingkungan hidup semakin baik atau semakin jelek. Dengan demikian laporan ini diharapkan diketahui sebab-sebab terjadinya penurunan atau peningkatan keadaan status lingkungan hidup, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan yang terjadi.

1.2. Isu Lingkungan Hidup

Isu pokok lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang adalah Kerusakan hutan dan kerusakan ekosistem DAS.

a. Degradasi Hutan

Hutan sebagai sumber daya alam yang merupakan sumber dari berbagai barang dan jasa perlu dikelola secara optimal dan lestari untuk menjaga eksistensinya. Pola pemanfaatan lahan yang dilaksanakan cenderung mengarah kepada aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek ekologi. Perubahan pola pemanfaatan

lahan yang semula lebih konservatif kearah monokultur menjadi pemicu utama semakin meluasnya lahan-lahan yang tidak produktif. Kabupaten Enrekang

Isu Degradasi Hutan

Tekanan penduduk terhadap sumberdaya alam telah mengancam kelestarian lingkungan hidup, sehingga menjadi penyebab kerusakan dan menyusutnya luas hutan.

Kotak 1.1

yang memiliki sumberdaya hutan seluas 85.948 ha (BPS, 2005) atau hanya sekitar 2,63% total luas hutan Sulawesi Selatan, mempunyai arti penting bagi masyarakat di daerah ini dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kawasan hutan di daerah ini didominasi oleh kawasan hutan lindung seluas 76.099 ha atau sekitar 85,23%.

Kependudukan merupakan penyebab penting kerusakan dan menyusutnya luas hutan. Ini nampak dari adanya korelasi negatif yang kuat dari kepadatan penduduk dengan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penambahan 1 persen penduduk, luas hutan menyusut 0,3 persen. Disamping itu, pembangunan yang terjadi banyak kegiatan yang merambah hutan, seperti pembalakan dan perladangan tradisional.

Kerusakan hutan di daerah ini, menyebabkan berbagai fungsi hutan tidak lagi optimal. Sistem hidrologi menjadi berubah, banjir dan sungai-sungai besar terjadi hampir setiap musim hujan. Banjir yang terjadi diikuti oleh terjadinya erosi dan longsor, yang mengakibatkan berbagai malapetaka yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Seiring dengan rusaknya sistem hidrologi terjadi pula kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan. Selain merusak sistem usahatani, kemarau panjang memicu terjadinya kebakaran hutan dan gejala ekosistem lainnya. Kerusakan hutan tidak hanya merusak tanaman dalam ekosistem hutan tersebut, tetapi berdampak luas pada sistem hidrologi, sistem lahan, sistem sosial, hukum dan lain sebagainya dan dampaknya tidak hanya bersifat lokal, regional dan bahkan global. Oleh karena itu kerusakan hutan perlu mendapat prioritas utama dalam pembangunan lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Enrekang.

Kondisi lahan yang menunjukkan peningkatan luas areal lahan kritis, hal ini menyebabkan luasan lahan produktif semakin berkurang dan secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani. Kabupaten Enrekang memiliki lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan. Laju pertumbuhan

luas lahan kritis lima tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini karena adanya upaya rehabilitasi.



Kebakaran hutan bukan semata-mata faktor alam, yaitu kekeringan. Faktor alam menyediakan kondisi untuk terjadinya kebakaran. Manusia memegang peran penting untuk merusak hutan dan meninggalkan limbah pembalakan di hutan dan menyediakan bahan bakar untuk terjadinya kebakaran. Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, tahun 2005 telah terjadi kebakaran hutan di dua lokasi yakni di Kecamatan Anggeraja diperkirakan seluas 38 ha dan di Kecamatan Malua diperkirakan sekitar 100 ha. Penyebab terjadinya kebakaran adalah akibat ulah orang yang membuang puntung rokok.

Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan semakin tidak terkendali karena Tahun 2005 telah terjadi kebakaran hutan di dua lokasi yakni di Kecamatan Anggeraja diperkirakan seluas 38 ha dan di Kecamatan Malua diperkirakan sekitar 100 ha. Akibat kebakaran hutan, ekosistem menjadi terganggu dan tidak seimbang.

Kotak 1.2

Konversi kawasan hutan menjadi lahan budidaya pertanian dan perkebunan rakyat merupakan pemicu utama terjadinya kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Dari aspek sosial ekonomi, tingginya interaksi sosial

ekonomi masyarakat terhadap kawasan hutan dan lahan, tekanan sektor lain di luar sektor kehutanan, serta konflik sosial masyarakat terhadap kawasan hutan dan lahan, merupakan fenomena-fenomena aktual yang harus segera diatasi melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Kerusakan Eksosistem DAS

Kabupaten Enrekang memiliki beberapa sungai besar penting yang masuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya adalah DAS Bila dan DAS Saddang berpotensi memunculkan berbagai konflik kepentingan dan pertikaian sosial antar kelompok dan bahkan antar instansi akibat persaingan dalam memanfaatkan sumber daya alam di daerah ini. Pada paparan berikut akan dijelaskan berbagai isu lingkungan yang mengemuka pada kedua DAS tersebut.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila

Kerusakan DAS Bila
Beberapa parameter untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi terhadap Kerusakan DAS Bila di Kabupaten ENREKANG sebagai akibat dari: <ul style="list-style-type: none">- Degradasi Hutan- Tekanan penduduk yang seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun.- Penggunaan lahan yang tidak terkendali- Dampak banjir dan Kekeringan.- Erosi dan sedimentasi.
Kotak 1.3

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila yang mempunyai hulu di Kabupaten Enrekang merupakan salah satu DAS yang penting dan mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan Regional Sulawesi Selatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila termasuk daerah pertanian yang potensial sebagai pemasok suplai pangan nasional.

Perusakan lahan khususnya hutan di hulu Sub DAS Bila telah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini belum ada

upaya-upaya efektif yang mampu menahan perusakan hutan yang berakibat meningkatnya luas lahan kritis. Komplik-komplik kepentingan berbagai pihak yang sering terjadi menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, tanah, sistem

hidrologi yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas lingkungan, degradasi lingkungan, banjir di wilayah hilir serta kekeringan yang berkepanjangan dan berlanjut kepada menurunnya tingkat pendapatan petani. Kerusakan ekosistem DAS Bila telah berdampak pada pendangkalan di Danau Tempe. Akibat pendangkalan danau tersebut, maka produksi ikan beberapa tahun terakhir menurun drastis. Selain itu kualitas ekosistem danau menurun, sehingga beberapa spesies ikan dan burung-burung air endemik menjadi terancam punah. Oleh karena pendangkalan danau ini menyangkut kehidupan puluhan ribu penduduk di sekitar danau, maka perlu upaya-upaya serius untuk menanganinya.

Masalah banjir di wilayah DAS Bila merupakan masalah pokok yang terus menerus terjadi dan cenderung meningkat. Setiap tahun wilayah ini mengalami banjir yang cukup besar terutama penduduk yang bermukim di daerah hilir Sungai Bila, Bulu Cenrana, Bungin dan beberapa sungai besar lainnya. Kondisi wilayah hulu sub DAS Bila sudah sangat memprihatinkan dimana berbagai aktivitas seperti perambah hutan, penebangan liar, pemanfaatan areal hutan untuk kegiatan perkebunan coklat, kopi, cengkeh dan lainnya yang dilakukan oleh penduduk merupakan penyebab terjadinya banjir di daerah hilir. Erosi merupakan salah satu masalah di hulu Sub DAS Bila yang menyebabkan terjadinya lahan kritis dan lahan tidak produktif. Luas lahan kritis di hulu Sub DAS Bila seluas 21.272 ha. Akibat lain adalah terjadinya longsor pada beberapa alur sungai dan badan jalan utama yang dapat menghambat kelancaran transportasi.

Sedimentasi juga merupakan masalah yang ada di hulu Sub DAS Bila. Setiap tahun terjadi peningkatan sedimentasi. Sungai-sungai utama menjadi dangkal dan bahkan pada daerah tertentu sungai hampir rata dengan pemukiman penduduk. Hal tersebut akan dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan penduduk. Akibat lain yang ikut terganggu adalah sarana perhubungan, jembatan dan jalan utama menjadi rusak dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang

Sungai Saddang yang dibentuk dari beberapa sungai kecil di daerah hulu Kabupaten Tator dan Enrekang, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan indikasi kerusakan di daerah hulu. Terdapat beberapa sub DAS yang mengalir pada DAS Saddang seperti Sub DAS Malua, Sub DAS Mata Allo dan Sub DAS Saddang. Sub DAS Malua berhulu pada gugusan pegunungan Latimojong

Kerusakan DAS Saddang

Terdapat indikasi kerusakan daerah hulu pada Sub DAS Saddang dan Sub DAS Mata Allo yaitu air berwarna keruh dan pada daerah hulu terjadinya peningkatan luas areal lahan kritis, yang berakibat pada lahan pertanian produktif berkurang dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat.

Kotak 1.4

dan bermuara dan menyatu dengan Sungai Mata Allo. Sub DAS Mata Allo berhulu pada gugusan pegunungan Toraja bagian selatan bermuara dan menyatu dengan Sungai Saddang. Sub DAS Saddang berhulu di pegunungan Toraja bagian selatan dengan hilir pertemuan Sungai Mamasa dan Sungai Mata Allo dan mengalir ke Sungai Saddang. Aliran sungai daerah hilir terjadi pendangkalan yang diakibatkan oleh erosi pada bagian hulu yang dibawa oleh arus air pada beberapa daerah dan membentuk alur baru serta terjadinya pelebaran bibir sungai.



Salah satu pemandangan daerah hilir sungai Saddang, yang berpotensi banjir.

Kerusakan ekosistem DAS Saddang juga telah berdampak pada pendangkalan DAM Bakaru dan DAM Benteng sehingga produksi energi listrik PLTA Bakaru turun hingga 70 % dari kapasitas sesungguhnya. Kondisi ini akan mempengaruhi sistem pelistrikan dan pembangunan secara keseluruhan. Akibat lain dari kerusakan ekosistem DAS tersebut adalah banjir yang sering dialami oleh penduduk kota Enrekang, khususnya pada sekitar pasar sentral dan desa Cemba. Hampir setiap tahun penduduk yang ada bermukim di sekitar Sungai Saddang akan mengalami banjir. Banjir terjadi pada bulan oktober dan nopember, dimana pada bulan-bulan tersebut luapan air dari Sungai Mata Allo bertemu dengan luapan air dari Sungai Saddang dan bermuara di kota Enrekang yang menyebabkan setiap tahun kota Enrekang mengalami banjir. Banjir pernah terjadi dengan ketinggian 3 meter pada tahun 1987.

Mengingat dampak yang begitu luas dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut di atas, maka diperlukan suatu rencana tindak (action plans) di lapangan atau suatu rencana pengelolaan DAS terpadu yang melibatkan semua institusi terkait, masyarakat dan dunia usaha melalui pendekatan Ekosistem. Dengan rencana tindak dan rencana pengelolaan DAS terpadu diharapkan mengurangi terjadinya degradasi lingkungan, mengembalikan fungsi lingkungan DAS dan tercipta koordinasi dan keterpaduan diantara pihak-pihak yang terkait dalam suatu pandangan dalam pengelolaan Hulu Sub DAS Bila dan DAS Saddang sehingga sinkronisasi kebijakan dan implementasi kegiatan pengelolaan DAS menjadi efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan para pihak terkait mampu membangun komitmen-komitmen bersama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rencana tindak pengelolaan Hulu Sub DAS Bila dan DAS Saddang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

1.3. Kesadaran Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan

Masyarakat Kabupaten Enrekang mempunyai kearifan lokal dalam membangun hutan. Hal ini nampak dengan tumbuhnya tegakan-tegakan hutan jati, suren dan kemiri pada lahan-lahan masyarakat yang tidak potensial untuk tanaman semusim. Tegakan yang dibangun masyarakat terdiri atas dua pola yaitu pola tanam monokultur dan pola agroforestry. Pola agroforestry dengan menanam jenis tanaman kakao, pepaya, arem dan lainnya yang memiliki nilai ekonomi diantara tanaman kayu-kayuan.

Masalah sampah masih menjadi persoalan yang tiada hentinya. Disatu sisi kemampuan pemerintah rendah sementara disisi lain kesadaran masyarakat juga rendah. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah sampah tanggung jawab pemerintah semata. Sebagian masyarakat juga beranggapan sampah bukanlah masalah bila tidak berada disekitarnya. Walaupun pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang telah memberikan pelayanan gratis dengan tidak membayar retribusi sampah bagi penduduk yang ada diperkotaan namun kesadaran masyarakat dapat dikatakan masih belum optimal mengenai masalah sampah. Demikian pula halnya dengan saluran pembuang, sebagian masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi jika ada pembersihan saluran. Masyarakat menganggap bahwa pekerjaan tersebut adalah tugas dari pemerintah daerah, khususnya bagian kebersihan.

Mengingat dampak peningkatan sampah menyangkut kualitas hidup dan kehidupan di daerah-daerah khususnya pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, maka peran serta masyarakat perlu dioptimalkan, agar sampah tidak mengganggu kehidupan penduduk.

1.4. Kegiatan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Masih terdapat areal lahan pertanian seluas 35.241 ha yang potensial untuk dikelola oleh masyarakat. Namun demikian dari hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan hutan sebagai lahan usahatani tanaman semusim dan tanaman keras. Alasan masyarakat memanfaatkan kasawan hutan adalah tidak tersedianya lahan bagi mereka di luar kawasan hutan. Lahan-lahan pertanian potensial yang tidak termanfaatkan saat ini telah dikuasai oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun (umumnya mereka merantau) sehingga tidak dapat digarap oleh sekelompok masyarakat lainnya yang butuh lahan.

Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pokok masyarakat pada umumnya yang menghasilkan padi, palawija, dan sayur-sayuran. Kerusakan lingkungan yang timbul akan didominasi oleh dampak-dampak lingkungan yang bersumber dari kegiatan pertanian seperti tingginya erosi dan sedimentasi di sungai yang berasal dari penggunaan teknologi budidaya pertanian yang tidak tepat, berkurangnya areal hutan karena kegiatan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, dan pencemaran air yang berasal dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dari kegiatan pertanian. Dalam skala yang lebih kecil, limbah padat dan cair yang berasal dari pemukiman penduduk dapat juga menjadi sumber pencemaran perairan di kabupaten ini.

BAB 2

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2.1. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Visi merupakan inspirasi atau motivasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama menuju kondisi masa depan yang diinginkan. Misi merupakan peran yang harus diemban atau dijalankan. Dengan misi dapat menjadi acuan pokok bagi kerangka dan pola pengembangan kegiatan serta tuntunan operasional yang ingin dilaksanakan.

a. Visi

Visi Kabupaten Enrekang tahun 2000 dirumuskan sebagai berikut **“Kabupaten Enrekang sebagai Daerah Agropolitan yang Mandiri, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan pada Tahun 2010”** (RUTR Kab. Enrekang, 2000)

Penjabaran dari visi Kabupaten Enrekang diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial untuk pengembangan dimasa yang akan datang dengan didukung oleh potensi sumber daya alam yang tersedia, tingkat aksesibilitas, serta sarana dan prasarana. Potensi tersebut merupakan penunjang untuk menjadi Kabupaten Enrekang sebagai daerah Agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sektor pertanian. Perkembangan sektor pertanian berdampak positif dengan

berkembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industri pengolahan, perdagangan, lembaga keuangan, dan lain sebagainya.

- ✚ Pengembangan daerah Agropolitan, mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah, maupun daerah lain di luar Sulawesi Selatan.
- ✚ Pembangunan Kabupaten Enrekang harus dipandang dalam perspektif masa depan, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dengan demikian aspek kelestarian lingkungan menjadi tujuan utama.
- ✚ Hasil pembangunan akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud tidak hanya dipandang dari aspek fisik dan materi saja, tetapi mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrepulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilakukan mulai pemuatan struktur ekonomi dan struktur wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah, pemuatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui lembaga ekonomi rakyat (LER), dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengembangan kehidupan beragama.

b. Misi

Untuk mencapai visi yang diinginkan, maka rumusan misi Kabupaten Enrekang diuraikan sebagai berikut:

- ✚ Pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya di sektor pertanian, dalam kedudukannya sebagai pilar pendukung pengembangan perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan.

- ✚ Mengembangkan kerjasama dan sinergi kawasan serta keterkaitan fungsional antar daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian lokal dan otonomi daerah.
- ✚ Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang.
- ✚ Melakukan penataan ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkoneksi inter dan antar wilayah.
- ✚ Mengupayakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup.
- ✚ Mengupayakan terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional, berwibawa, bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
- ✚ Mengedepankan norma agama dan nilai-nilai budaya tradisional seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa sasaran lingkungan hidup adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dengan demikian Visi pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dimasa yang akan datang adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu mencakup: 1) pengelolaan sumberdaya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat, untuk mencapai efisiensi secara ekonomis dan ekologis (ekoefisiensi) dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan; 2) penegakan hukum untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan; 3) pendelegasian wewenang secara bertahap kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 4) pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal serta 5) penerapan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting dan strategis dalam menjamin fungsi lingkungan hidup sebagai pendukung dan penyangga ekosistem dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi dan budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan sekaligus mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka strategi kebijakan yang ditempuh meliputi:

- ✚ Pengelolaan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi melalui pendekatan mekanisme pasar (*market based instrument*) yang terkendali;

- ✚ Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukungnya;
- ✚ Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayahnya sebagai wujud dari otonomi daerah melalui sistem dan peraturan yang lebih memperhatikan masyarakat lokal.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang tersebut diatas, maka arah kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam bidang lingkungan hidup meliputi:

- ✚ Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan demi tewujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- ✚ Membina pengelolaan lingkungan yang berazaskan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.
- ✚ Meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan dari seluruh aparatur pemerintah di daerah untuk menanggulangi permasalahan pengelolaan lingkungan hidup.
- ✚ Meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan sumber daya alam dan peminan sumber daya manusia.

Sasaran yang telah ditetapkan dan sekaligus mengatasi permasalahan dan tantangan lingkungan hidup di daerah, maka strategi kebijakan yang ditempuh meliputi:

- ✚ Pembangunan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta memelihara kelestarian sumberdaya alam melalui berbagai bentuk penyuluhan dan penerangan baik kepada aparat

terkait maupun masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauannya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- ✚ Peningkatan kesadaran bagi penduduk untuk mengatasi berbagai masalah yang mendesak terutama di lahan-lahan kritis.
- ✚ Pembinaan lingkungan pemukiman yang serasi dan sehat dengan menata lingkungan yang berdasarkan zona pemukiman dan pelestarian sumber daya alam serta kawasan-kawasan lainnya.
- ✚ Mendorong dan meningkatkan peran serta dan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi, keterpaduan lingkungan hidup di daerah yang meliputi pemanfaatan, pendayagunaan lingkungan, penataan, pengawasan dampak lingkungan dan pengembangan kualitas lingkungan.
- ✚ Pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya aktivitas pembangunan.
- ✚ Mendorong dan membina penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk setiap kegiatan pembangunan di daerah.
- ✚ Penetapan sistem monitoring dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- ✚ Melakukan upaya rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam melalui pendekatan ekosistem DAS (Daerah Aliran Sungai) dan wilayah dengan kegiatan utama penghijauan, konversi tanah, reboisasi, pembinaan kawasan lindung dan lain-lain.
- ✚ Mempertahankan dan menjaga kawasan hutan sebagai kawasan lindung sehingga sistem kehidupan di alamnya tidak terganggu.

Pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya bertumpu pada kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan kependudukan sehingga perlu mendapat perhatian secara terintegrasi keseluruhan komponen masyarakat, sehingga segala kegiatan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi semata, akan tetapi lingkungan pun harus terlindungi, dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan sesuai daya tampung dan daya dukung (Carring Capacity) untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pada bagian ini akan menjelaskan kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. Rencana Strategi

Dengan adanya rumusan Undang-undang No.25 Tahun 1999 telah memberikan nuansa baru pada strategi pembangunan Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut tersirat bahwa pembangunan akan datang lebih desentralisasikan, yaitu pembangunan yang direncanakan dari bawah dan lebih berorientasi pada *resource based strategy*. Ini berarti, daerah semakin mempunyai peluang untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis dan menuntut daerah untuk lebih mengelola sistem pemerintahan dan pembangunan secara lebih mandiri dan profesional. UU No.22 Tahun 1999, Pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa ada sebelas (11) bidang pemerintahan yang akan menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota, yaitu: Pekerjaan Umum, Kesejahteraan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Perdagangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Koperasi dan UKM, dan Tenaga Kerja. Oleh karena itu, demi terciptanya pengelolaan otonomi daerah yang profesional, maka daerah dituntut untuk merumuskan

kebijaksanaan dan strategi sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Arahan kebijaksanaan dan strategi pada masing-masing bidang dalam pemerintahan diuraikan sebagai berikut:

- Pertanian

a) Arahan Kebijakan

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan) serta perluasan kesempatan kerja, Kabupaten Enrekang pada umumnya dan KTE pada khususnya.
- Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas unggulan untuk mewujudkan usaha pertanian yang maju, efektif, dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
- Mewujudkan pertanian yang berbasis pada *resource based strategy* dengan mengembangkan, baik teknologi tepat guna maupun teknologi modern.

b). Strategi

- Peningkatan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian secara terpadu dan menyeluruh.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan serta penerapan iptek pertanian.
- Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana produksi serta pemberdayaan kelembagaan yang mendukung sektor pertanian di Kabupaten Enrekang, utamanya di wilayah KTE.
- Peningkatan pembinaan dan penyuluhan serta pengamanan usaha tanaman pangan, perkebunan, usaha ternak rakyat, dan petani tambak, serta usaha rakyat lainnya.
- Merumuskan regulasi dan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

- Pengembangan teknologi tepat guna dan modern menuju pertanian yang efisien yang unggul.

- **Pertambangan**

a). Arahan kebijaksanaan

- Pembangunan pertambangan diarahkan pada inventaris secara akurat dan valid potensi pertambangan dan mendorong para pelaku ekonomi, baik lokal, domestik maupun asing, untuk mengeksplorasi potensi-potensi pertambangan yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

b). Strategi

- Melakukan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan jenis tambang galian golongan “C”.
- Merangsang para pelaku ekonomi (investor) untuk melakukan eksplorasi potensi tambang melalui penyederhanaan birokrasi (perizinan), pemberian intensif, peraturan daerah (Perda) yang mendukung, disertai aturan sanksi yang jelas.
- Penyusunan profil investasi di sektor pertambangan dengan tingkat akurasi dan validitas yang tinggi.

- **Perhubungan**

a) Arahan Kebijakan

- Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, baik kuantitas maupun kualitas, terutama perhubungan darat utamanya di KTE, untuk melancarkan arus barang dan jasa, menunjang pengembangan sektor-sektor strategis meningkatkan pertumbuhan wilayah serta mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya agar tercipta interkoneksi antar wilayah.

- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan jasa dan telekomunikasi untuk memperlancar arus surat, arus barang dan jasa giro, informasi dan arus berita untuk mendukung proses pembangunan baik untuk kepentingan pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

b) Strategi

- Penataan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas jaringan transportasi darat dan sungai untuk memperlancar roda perekonomian.
- Peningkatan jaringan jalan yang sudah ada dan membuka jaringan jalan yang baru serta meningkatkan sarana transportasi darat yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat permukiman.
- Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan untuk memecahkan masalah wilayah pedesaan yang masih terisolasi terutama meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan jalur jalan lingkaran kabupaten untuk mendukung keberadaan daerah-daerah sentra produksi yang memiliki aksesibilitas yang cukup rendah.
- Peningkatan aksesibilitas dalam usaha peningkatan interaksi antar pusat-pusat permukiman.
- Peningkatan aksesibilitas eksternal dalam kaitan kemudahan eksport hasil produksi dan import kebutuhan primer dan sekunder.
- Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan pada kota-kota yang sudah berkembang dengan tetap pada standar teknik.

- Pembangunan dan peningkatan pelayanan jasa dan telekomunikasi yang berfungsi untuk mendukung kegiatan perekonomian.
- Mengupayakan pelayanan jasa dan telekomunikasi dengan baik dan dapat menjangkau lapisan masyarakat, baik daerah perkotaan, perdesaan, dan terpencil.

- Industri dan Perdagangan

a). Kebijakan

- Mendorong para pelaku ekonomi untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang belum terkelola, khususnya potensi pertambangan, melalui berbagai penyediaan infrastruktur, data pokok potensi, insentif, dan kemudahan-kemudahan.
- Mengupayakan tumbuh kembangnya perusahaan daerah dan usaha-usaha swasta lokal, khususnya industri rakyat, yang dikelola secara profesional dan efisien, sehingga mampu bersaing.
- Mengembangkan sistem informasi dan jaringan perdagangan, baik dalam skala regional, maupun global, sehingga dapat menstimulasi peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran.

b). Strategi.

- Penyediaan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para investor yang berminat untuk mendirikan industri yang mengelola potensi sumberdaya alam.
- Melakukan pembinaan manajemen usaha yang berorientasi profit dan persaingan pada perusahaan-perusahaan daerah dan industri rakyat.

- Pengembangan program-program peningkatan produksi pada komoditas-komoditas yang berorientasi ekspor, termasuk pengeluaran jalur distribusi dan perdagangan.
 - Pengembangan semacam warung informasi (warsi) yang dapat menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi, khususnya kalangan pengusaha.
- **Penanaman Modal**
- a). Arahan Kebijaksanaan
- Mengembangkan perencanaan investasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), utamanya pada KTE, bukan hanya untuk sektor pemerintah akan tetapi juga meliputi sektor swasta.
 - Menyediakan profil investasi dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk Kabupaten Enrekang, utama di TKE.
 - Memberikan rangsangan kepada investor, baik lokal, nasional maupun meliputi nasional melalui birokrasi yang profesional, pengembangan peraturan daerah, kemudian dalam memperoleh izin lokasi industri dan pengelolaan sumber daya alam.
 - Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan alternatif seperti modal ventura yang dikelola secara profesional serta pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha swasta.
- b). Strategi
- Penyusunan dan sosialisasi perencanaan investasi, baik kepada instansi pemerintahan terkait maupun pada investor.
 - Penyusunan profil investasi, utamanya untuk Kawasan Timur Enrekang (KTE), yang mempunyai tingkat akurasi yang tinggi

sehingga betul-betul sanggup memberi informasi yang lengkap, jelas, dan aktual bagi para investor.

- Pengembangan peraturan daerah dibidang penanaman modal yang sanggup memberi daya tarik bagi investor.
- Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien dan profesional melalui perampingan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat, dan peningkatan kualitas pelayanan.
- Kemudian dalam memperoleh lokasi industri dan izin pengelolaan sumber daya alam.
- Pembentukan lembaga keuangan modal ventura dan lembaga usaha melalui pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta.

- Pertanahan

a). Arahan Kebijaksanaan

- Melakukan kebijaksanaan perencanaan penguasaan dan penatagunaan tanah dengan prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan berwawasan lingkungan.
- Penyempurnaan tata laksana permohonan hak, pemanfaatan tanah dan penyelesaian masalah dalam rangka mewujudkan "*Catur Tertib Pertanahan*".
- Meningkatkan pelaksanaan pengukuran/penataan, pendaftaran tanah dan informasi pertanahan dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
- Melaksanakan reformasi di bidang pertanahan dengan paradigma baru yaitu mewujudkan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Menciptakan dan melakukan penyempurnaan terhadap kelembagaan pertanahan, meningkatkan sumberdaya manusia

dan mengembangkan administrasi pertanahan yang lebih profesional.

b). Strategi

- Pengaturan penguasaan, pemilikan tanah dan penataan peruntukan penggunaan tanah.
- Pembatasan penguasaan pemilikan atas tanah, baik perorangan maupun badan hukum.
- Penggunaan tanah disesuaikan dengan rencana tata ruang dan kemampuan tanah agar pemanfaatan/penggunaan tanah dapat lebih berwawasan lingkungan.
- Penyederhanaan prosedur dan birokrasi sehingga dapat tercipta biaya murah dan cepat dalam proses permohonan hak dan tanah.
- Peningkatan koordinasi dalam upaya menyelesaikan masalah pertanahan, baik dengan secara institusional maupun melalui musyawarah mufakat dengan masyarakat.
- Menyediakan anggaran dalam rangka pengadaan tanah bagi instansi pemerintah.
- Penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
- Pengembangan kelembagaan pertanahan yang hemat struktur dan kaya fungsi.
- Pelaksanaan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

- **Pekerjaan Umum.**

a) Arahan Kebijaksanaan

- Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pekerjaan umum.

- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk mobilitas manusia, barang dan jasa.
- Meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia, teknologi dan manajemen Pekerjaan Umum.

b) Strategi

- Peningkatan penyediaan dan pengelolaan sumber daya air untuk keperluan unit-unit produksi dan pemukiman
- Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan raya dan jembatan untuk memperlancar arus barang dan jasa
- Peningkatan dan pengembangan penataan bangunan dan permukiman dalam rangka penyehatan lingkungan
- Peningkatan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia dalam manajemen pekerjaan umum melalui pendidikan dan latihan.

- **Kesehatan**

a) Arahan Kebijaksanaan

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara terpadu dan merata sampai ke pelosok-pelosok desa.
- Meningkatkan mutu dan pemerataan fasilitas kesehatan pada semua lapisan masyarakat.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga sosial desa dalam rangka mewujudkan kualitas hidup sehat dan pelebagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- Meningkatkan upaya mandiri masyarakat dalam mencegah penyakit menular (berbahaya) dan pengedaran serta pemakaian obat-obat terlarang (narkoba).

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan secara terpadu untuk menekankan angka kematian ibu, bayi dan balita.

b) Strategi

- Membentuk “Desa Sehat” melalui peningkatan penyuluhan cara hidup sehat, perbaikan gizi keluarga, dan sanitasi lingkungan.
- Peningkatan dan penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan terampil (medis dan paramedis) secara merata ke desa-desa oleh masyarakat, swasta dan pemerintah.
- Peningkatan dan pemantapan sarana dan kaderisasi pos yandu dan program KB
- Penyediaan obat-obatan bermutu dan terjangkau oleh daya beli masyarakat dan penyediaan pengobatan alternatif oleh pemerintah dan swasta.
- Melaksanakan penyuluhan kesehatan dasar dan narkoba pada sekolah-sekolah mulai dari TK sampai ke SMU.

- Pendidikan dan Kebudayaan

a) Arahan Kebijaksanaan

Pendidikan

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kebutuhan akan pendidikan pada semua lapisan masyarakat.
- Meningkatkan penataan lembaga dan manajemen pendidikan prasekolah, sekolah, dan luar sekolah secara profesional dan bertanggung jawab.
- Mengembangkan lembaga pendidikan prasekolah, sekolah, dan luar sekolah, untuk memenuhi sumber daya manusia yang di butuhkan oleh pasar tenaga kerja.

- Meningkatkan penyuluhan dan pemanfaatan serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada lembaga pendidikan dan masyarakat luas.

Kebudayaan

- Melestarikan nilai-nilai budaya dan peninggalan sejarah yang mengandung nilai perjuangan yang merupakan kebanggaan untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air.
- Mengembangkan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah untuk mendukung pengembangan bahasa nasional.
- Melestarikan nilai-nilai budaya daerah untuk memperkuat jati diri bangsa dan potensial sebagai komoditas bangsa.
- Melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah (tradisional) untuk mengembangkan kesenian/budaya nasional.

- Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a). Arah Kebijakan

- Meningkatkan kinerja koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), baik dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen usaha.
- Mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembinaan Lembaga Ekonomi Rakyat (LER).
- Mengembangkan usaha kecil menengah (UKM), termasuk sektor informal, yang lebih terbukti adaptif dan maupun bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi, melalui penciptaan iklim persaingan yang sehat dan menghilangkan distorsi pasar.

b). Strategi

- Peningkatan kemampuan manajemen usaha dan keuangan melalui program pembinaan yang intensif.
- Penguatan kelembagaan, kinerja, dan fungsionalisasi Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) melalui pembinaan yang terstruktur dan sistematik.
- Pelibatan perguruan tinggi dalam berbagai usaha yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme koperasi dan UKM.
- Peningkatan kemampuan SDM koperasi dan UKM, khususnya di bidang penyusunan proposal (tawaran) kerja sama kemitraan.
- Pengembangan *sharing* informasi antara sesama KUD dan UKM maupun dengan lembaga-lembaga terkait.

- Tenaga Kerja

a). Arah Kebijaksanaan

- Meningkatkan kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai macam tingkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada.
- Meningkatkan dan merumuskan sistem mekanisme distribusi tenaga kerja sesuai dengan sektor pembangunan, peningkatan pemanfaatan tenaga kerja antar sektor, serta pelibatan dunia usaha untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- Meningkatkan peluang kesempatan kerja dalam upaya perluasan dan penggunaan tenaga kerja.
- Meningkatkan perlindungan sistem jaringan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja.

b). Strategi

- Melaksanakan berbagai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan ketrampilan agar lebih siap dalam memasuki pasar kerja dengan memaksimalkan pemanfaatan balai-balai latihan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun dunia usaha. Disamping itu melakukan pembinaan terhadap kewirausahaan.
- Melaksanakan upaya penyebaran pemanfaatan tenaga kerja baik melalui pengembangan wilayah maupun dengan kerjasama dengan sektor, daerah dan antar negara.
- Melakukan upaya-upaya pembukaan lapangan usaha/kerja baru serta pengembangan produktivitas tenaga kerja dengan mengikut sertakan dunia usaha dalam proses pembinaannya.
- Pembangunan wilayah-wilayah terpadu dengan program kesempatan kerja dan program ketenagakerjaan.

- Pariwisata

a). Arahan Kebijaksanaan

- Di sektor pariwisata, kebijaksanaan diarahkan pada penataan berbagai tempat-tempat wisata yang sudah ada maupun pada obyek wisata yang belum dikelola dan melakukan berbagai upaya promosi wisata dengan memanfaatkan travel dan agen wisata.

b). Strategi

- Penataan tempat-tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- Melakukan promosi wisata, baik melalui penerbitan liflet, brosur maupun melalui keikutsertaan dalam berbagai

pameran wisata. Promosi wisata juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan travel-travel dan agen-agen wisata, baik skala lokal maupun domestik.

- Pengembangan agrowisata sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Enrekang.

- **Aparatur Pemerintahan**

a). Arahan Kebijaksanaan

- Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada upaya reposisi fungsi dan peran pemerintah dari “pelaku utama pembangunan” menjadi inisiator, fasilitator, motivator dan regulator pembangunan. Disamping itu pembangunan aparatur pemerintahan juga diarahkan pada upaya penciptaan aparatur pemerintah yang profesional, berwibawa, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

b). Strategi

- Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, penghargaan terhadap prestasi kerja, dan lain-lain.
- Peningkatan kualitas pelayanan (pelayanan prima) kepada masyarakat, melalui birokrasi yang cepat, murah, transparan, dan bertanggung jawab.
- Penciptaan iklim dan lingkungan kerja yang kondusif melalui pengembangan budaya kerja positif, penghargaan terhadap prestasi kerja, menghilangkan faktor *like and dislike* dalam penentuan jabatan, saling menghormati, menghargai dan lain-lain.
- Membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek KKN.

- Dalam rangka penataan kelembagaan pemerintahan daerah, maka struktur organisasi pemerintahan daerah diarahkan pada struktur yang ramping namun kaya fungsi.

Pembangunan daerah adalah sub sistem pembangunan nasional, dan bagian integral dari pembangunan nasional. Pola dasar pembangunan Kabupaten Enrekang menganut pokok-pokok, pikiran, dasar-dasar landasan pembangunan, serta berbagai penjabaran lebih lanjut dan implementasi dari Pola Dasar Pembangunan Nasional serta GBHN.

Pola dasar pembangunan Kabupaten Enrekang adalah garis-garis kebijaksanaan program pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang yang pada hakekatnya merupakan perwujudan pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Nasional serta GBHN dalam wilayah Kabupaten Enrekang, dan berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan di daerah agar lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka mengisi pembangunan nasional sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah.

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah sejalan dan selaras dengan tujuan pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan, yakni pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama terciptanya suatu struktur ekonomi yang berimbang antar sektor pertanian dan sektor industri untuk mendukung pertumbuhan kegiatan sektor pertanian yang tangguh.

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, disamping pembangunan sektor lainnya tetap dilaksanakan dan ditingkatkan secara bersama-sama dan terpadu serta saling menunjang. Proses pembangunan merupakan interaksi dari berbagai sumber daya alam dan diupayakan penggunaannya secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan meliputi :

1. Regional dan Nasional, menunjang terciptanya tujuan Repelita ketujuh Propinsi Sulawesi Selatan dan Repelita Nasional.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap proses tinggal landas pada Pembangunan Jangka Panjang berikutnya dengan tetap memperhatikan dan efektifitas sumber daya serta aspirasi dari masyarakat.
3. Secara Regional ikut mendukung Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil pangan di Indonesia Bagian Timur dengan memantapkan dan mengembangkan potensi Kabupaten Enrekang.

Prioritas pembangunan dilakukan dengan tetap berpedoman pada pola dasar pembangunan jangka panjang sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan yang dihadapi wilayah Kabupaten Enrekang untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang optimal dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi tanaman pangan untuk menunjang pemantapan swasembada pangan secara regional dan nasional melalui pola usaha tani secara intensif, dengan tujuan :
 - Meningkatkan pendapatan petani.
 - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang berimbang proses industrialisasi perlu digalakkan dan dipadu dengan peningkatan laju pertumbuhan sub sektor industri kecil, industri rumah tangga, industri kerajinan, dan industri pertanian (agroindustri), terutama pengembangan industri persuteraan alam, industri tapioka dan industri pengolahan gula merah yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja serta pengembangan Kawasan Timur Enrekang dengan titik berat pertumbuhan pada sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

2. Pemantapan penjabaran program pengwilayahan komoditi untuk peningkatan produksi pertanian yang disertai pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, efisiensi perencanaan pembangunan melalui program penataan ruang wilayah menuju penertiban dan penanganan masalah pertanian.
3. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi guna peningkatan produksi pertanian, utamanya pertanian tanaman pangan : padi, palawija, dan hortikultura.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pembinaan pengusaha ekonomi lemah, peningkatan sumber daya alam (hutan, tanah, dan air), dan pembangunan bidang sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan dan lain-lain, untuk saling menunjang dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang dicita-citakan.

Sasaran pembangunan daerah adalah terciptanya landasan yang kuat atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk itu maka program pembangunan disusun secara berencana, bertahap dan berkesinambungan, melalui kebijaksanaan sektoral dan lintas sektoral pertimbangan wilayah/daerah yang mengarah pada pengelolaan sumber daya secara optimal dengan memperhatikan

usaha pelestarian lingkungan hidup. Pertimbangan yang dapat ditempuh sebagai berikut :

- Kebijakan sektoral, ditujukan pada program pembangunan bidang ekonomi yang berimbang antara sektor pertanian dan sektor industri serta sektor-sektor lainnya. Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produksi, jasa dan pemasaran yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memberikan prioritas pembangunan sektor pertanian dengan suatu sistem pengembangan yang berdimensi wilayah, melalui pola pengwilayahan komoditi utama Sulawesi Selatan. Pembangunan ekonomi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan Regional Kabupaten Enrekang melalui peningkatan sektor-sektor andalan yang diprioritaskan antara lain sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, koperasi, industri rumah tangga, industri pertanian sebagai modal utama untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.
- Sejalan dengan pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang lainnya tetap dilaksanakan secara bersama dan terpadu antara lain : bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya, bidang politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan, komunikasi sosial, bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Kebijakan spasial, yakni kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan pendekatan pengembangan pola tata ruang berdimensi wilayah.
- Menentukan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah tertentu untuk menarik pertumbuhan wilayah sekitarnya (daerah hinterland) sebagai daerah/wilayah pelayanan dalam menunjang

untuk tumbuh dan berkembangnya pusat pertumbuhan yang dapat memberikan umpan balik terhadap wilayah belakangnya.

- Terjadinya keseimbangan laju dan tingkat pertumbuhan antara setiap wilayah dan antar sub wilayah.
- Melalui pola ruang wilayah diharapkan terjadi hubungan, keterikatan dan saling ketergantungan antar setiap wilayah, antar pusat pertumbuhan dengan daerah hinterlandnya, sehingga terjalin suatu koordinasi dan keterpaduan antara setiap wilayah melalui hirarki masing-masing (kabupaten-kecamatan-desa/kelurahan).
- Menciptakan dan mengembangkan suatu pola hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah kabupaten dengan kabupaten lainnya, agar terjalin suatu ikatan ekonomi, sosial budaya, dan hankamnas antar daerah yang kuat di dalam kerangka kesatuan regional yang kokoh.
- Melalui struktur tata ruang yang ada diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dikaitkan dengan pertimbangan orientasi geografis, hubungan kegiatan ekonomi, latar belakang sosial budaya, dan sumber daya yang dimiliki : maka wilayah Kabupaten Enrekang terdiri atas sembilan kecamatan, dengan luas wilayah 1.786,01 km² atau sekitar 2,93% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dibagi atas 4 (empat) sub wilayah pembangunan sebagai berikut :

1. Sub wilayah pembangunan Bagian Tengah (D) dengan pusat pengembangan Enrekang, meliputi wilayah kecamatan Enrekang dan sebagian wilayah kecamatan Enrekang Selatan.

2. Sub wilayah pembangunan bagian Utara (A) dengan pusat pengembangan di Belajen, meliputi seluruh kecamatan wilayah kecamatan Alla dan sebagian wilayah kecamatan Alla Timur.
3. Sub wilayah pembangunan bagian Selatan (E) dengan pusat pengembangan di Maroangin, meliputi wilayah kecamatan Maiwa dan sebagian wilayah kecamatan Maiwa Atas.
4. Sub Wilayah Pembangunan Bagian Timur (C) dengan pusat pengembangan di Baraka dan sebagian wilayah kecamatan Maiwa Atas.
5. Sub wilayah pembangunan Bagian Barat (B) dengan pusat pengembangan di Cakke dan sebagian wilayah kecamatan Anggeraja Timur.

d. Pengwilayahan Komoditas

Program pengwilayahan sebagai strategi dasar pembangunan daerah merupakan upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, strategi dasar pembangunan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama beberapa periode. Repelita sebelumnya dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang serta menilai potensi, kemampuan dan peluang pengembangan yang dimiliki kabupaten Enrekang dengan mempertimbangkan :

- Letak dan orientasi geografis wilayah
- Tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi yang ditunjang oleh sarana dan ketersediaan prasarana yang memadai.
- Jumlah penduduk
- Kesiapan masyarakat menerima dan menerapkan program pengwilayahan komoditi dan tata ruang daerah sebagai dasar untuk menciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan.

- Kecenderungan petani untuk beralih kegiatan usaha tanah monokultur ke sifat polikultur.
- Kecenderungan berkembangnya kegiatan industri kecil dan koperasi.
- Kemungkinan peluang bagi wilayah Kabupaten Enrekang menjadi jalur lintas wisata dan daerah tujuan wisata.
- Tersedianya fasilitas kredit bagi pengembangan usaha yang ditunjang dengan adanya deregulasi dan debirokrastisasi.

2.2. Kebijakan Tata Ruang

Bidang tata ruang memegang peranan penting dalam mewujudkan keajahteraan masyarakat. Pada prinsipnya semua kegiatan pembangunan seyogyanya harus mengacu kepada Tata Ruang agar tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan pelayanan publik dalam ruang yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Karakteristik penataan ruang sangat terkait erat dengan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan bahkan pertahana-keamanan. Penataan ruang menekankan pendekatan sistem yang dilandasi oleh empat prinsip utama yakni: (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan antara kawasan (antar desa-desa atau hilir-hilir), (c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor/stakeholder dan lintas wilayah administratif serta (d) Pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai buku pedoman penyusunan RTRW kabupaten (Direktorat Bina Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan Dirjen PU Cipta Karya, 1996), tujuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan RTRW kabupaten yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan serta sesuai dengan kebutuhan

pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan SDB dalam rangka mencapai keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

- ✚ Menetapkan alokasi kawasan lindung dan kawasan budidaya
- ✚ Menetapkan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu
- ✚ Menetapkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan dan perdesaan.
- ✚ Menetapkan sistem prasarana wilayah terdiri atas prasarana transportasi, pengairan, energi/listrik, telekomunikasi, prasarana pengelolaan lingkungan
- ✚ Menetapkan pengembangan kawasan prioritas pengembangan/panganan selama jangka waktu rencana
- ✚ Tersusunnya penatagunaan lahan serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, yang merupakan bagian integral dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten.

2.3. Kebijakan Sosial Budaya

Pembangunan yang semakin berkembang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan aparatur pemerintah, partisipasi aktif masyarakat yang dinamis dalam pembangunan.

Kondisi sosial budaya penduduk asli Kabupaten Enrekang, memperlihatkan tenggang rasa dan pembauran adat istiadat yang cukup

harmonis serta keterkaitan yang semakin erat antar berbagai suku yang ada termasuk peranan faktor agama islam yang cukup dominan.

Sejalan dengan visi Kabupaten Enrekang tentang kebijakan sosial budaya dimana hasil pembangunan akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud tidak hanya dipandang dari aspek fisik dan materi saja, tetapi mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrepulu.

Rumusan misi kebijakan sosial budaya yaitu dengan mengedepankan norma agama dan nilai-nilai budaya tradisional seperti kejukuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.4. Kebijakan Sosial Ekonomi

Strategi dasar kebijaksanaan yang dijadikan dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk program-program terpadu dengan skala prioritas meliputi berbagai bidang pembangunan yang disesuaikan dengan pengwilayahan komoditi serta tetap berpedoman pada arah pembangunan daerah jangka panjang, titik beratnya adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama terciptanya struktur ekonomi daerah yang berimbang antara sektor pertanian dan kegiatan sektor perindustrian. Berdasarkan sasaran dan tujuan pembangunan daerah serta kemampuan dan peluang yang dimiliki, maka prioritas pembangunan daerah ditujukan pada :

- Optimalisasi kontribusi sektor pertanian utamanya sub sektor pertanian tanaman pangan untuk menunjang program swasembada pangan reegional dan nasional, disamping program diversifikasi kegiatan

usahan pertanian lainnya seperti sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, berdasarkan perwilayahan komoditi : hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, serta untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha diluar sektor pertanian seperti sektor perindustrian, perdagangan dan transportasi.

- Menciptakan struktur ekonomi daerah yang berimbang. Saat ini masih didominasi sektor pertanian, dan masih memerlukan sektor industri.
- Pemantapan pelaksanaan program pengwilayahan komoditi untuk meningkatkan produksi pertanian diikuti upaya pelestarian lingkungan hidup, serta efisiensi perencanaan pembangunan melalui program penataan ruang wilayah menuju penertiban dan efektifitas penanganan/pemanfaatan ruang.

Setiap langkah kegiatan pelaksanaan pembangunan, selain pertimbangan sektoral tetap memperhatikan pertimbangan wilayah/daerah yang mengarah pada pengelolaan sumber daya yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, selain itu perlu diusahakan terjalannya keserasian dan keseimbangan laju pembangunan dan pertumbuhan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah, yakni pembagian wilayah ke dalam sub wilayah pembangunan yang diikuti dengan program pengembangan komoditi tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria lahan yang cocok bagi pengembangan komoditi tersebut.

Melalui pembagian wilayah ke dalam sub wilayah pembangunan sebagai wujud tata ruang wilayah, diharapkan sub-sub wilayah pembangunan dengan pusat pengembangan dapat berperan sepenuhnya sesuai fungsi yang diemban, untuk menarik dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam wilayah pengaruhnya, secara bersama-sama dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya dapat menunjang terlaksananya program dan cita-cita pembangunan nasional, sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB 3

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

3.1. Keadaan Umum

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara koordinat 3°14'36" - 3°50'00" Lintang Selatan, dan antara 119°40'53" - 120°06'33" Bujur Timur. Berada pada ketinggian 47 – 3.239 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 1.786,01 km² dan kurang lebih 236 km di sebelah Utara Kota Makassar.

Batas wilayah Kabupaten Enrekang, disebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, di sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang di sebelah Barat.

Secara administratif Kabupaten Enrekang terbagi kedalam 9 wilayah kecamatan dengan 111 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa dengan luas 392,87 km² atau sekitar 22,00 persen dari luas wilayah Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Malua yaitu sebesar 40,36 km² atau hanya sekitar 2,26 persen dari luas total Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang mengalir beberapa sungai besar yang cukup potensial mengairi tanah-tanah pertanian, antar lain : Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, Sungai Malua, Sungai Pasui, Sungai Mamasa dan Sub DAS Cenrana – Karajae.

3.2. Lingkungan Alam

3.2.1. Kawasan Hutan

Kabupaten Enrekang memiliki kekayaan sumberdaya hutan seluas 87.352 ha atau 49,46 % luas wilayah Kabupaten Enrekang (Bapedalda Sulsel, 2004). Kawasan hutan tersebut mempunyai arti penting bagi masyarakat khususnya Kabupaten Enrekang dan wilayah-wilayah sekitarnya. Umumnya kawasan hutan di Kabupaten Enrekang didominasi oleh kawasan hutan lindung yaitu seluas 72.775 ha atau sekitar 83,3 persen dan hutan produksi tetap seluas 14.597 ha.

Proporsi kawasan hutan terhadap luas wilayah Kabupaten Enrekang masih cukup besar yakni 48,8 %, akan tetapi distribusi kawasan hutan tersebut tidak merata. Kawasan hutan Kabupaten Enrekang hanya terdapat pada lima kecamatan, yaitu Kecamatan Maiwa, Enrekang, Baraka, Anggeraja dan Alla. Namun demikian hasil perhitungan luas kawasan hutan secara digital berdasarkan peta lampiran berita acara tata batas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Enrekang oleh BPKH VII Kabupaten Enrekang, menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebar pada seluruh kecamatan.

Lahan Kritis *Isu yang mengemuka*

Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan terdapat seluas 42.019,49 ha. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan sekitar 23.151 ha. Dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 36.706 pada tahun 1998 menjadi 23.151 ha pada tahun 2003. (Bapedalda Sulsel, 2004)

Kotak 3.1

Lahan Kritis

Rekomendasi

Prioritas rehabilitasi hutan dan lahan dengan fokus pada kegiatan, pola tanam, jenis tanam dan jarak tanam dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal.

Mengambil langkah pencegahan terhadap kegiatan yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan

Program RHL Lebih memfokuskan diri pada perencanaan makro yang bersifat holistik dan terintegrasi.

Kotak 3.2

(Bapedalda Sulsel, 2004) bahwa Kabupaten Enrekang memiliki lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 42.019,49 ha yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, laju pertumbuhan luas lahan kritis selama lima tahun terakhir rata-rata menunjukkan penurunan seluas 2.658 ha pertahun, yakni seluas

36.706 ha pada tahun 1998 menjadi 23.151 ha pada tahun 2003. Upaya rehabilitasi yang dilakukan selama lima tahun terakhir masih sangat kecil yakni rata-rata seluas 560 ha pertahun. Jika dibandingkan dengan penurunan luas lahan kritis selama 5 tahun terakhir yakni rata-rata seluas 2.658 ha per tahun, maka ini berarti bahwa kontribusi kegiatan reboisasi terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang hanya sebesar 21,0 %.

Mengacu pada Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003, areal sasaran rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang adalah seluas 62.415 ha, terdiri dari seluas 3.643 ha termasuk dalam kategori prioritas 1, seluas 35.395 ha kategori prioritas 2, seluas 32.578 ha kategori prioritas 3 dan seluas 799 ha kategori prioritas 4. Areal sasaran RHL tersebut sebagian besar 80,3 % atau seluas 50.130 ha berada di luar kawasan hutan (APL) dan hanya seluas 12.285 ha (19,7 %) berada dalam kawasan hutan. Dengan kata lain hanya 14,0 % dari total kawasan hutan Kabupaten Enrekang (seluas 87.352 ha) yang menjadi areal sasaran RHL.

Berdasarkan data perkembangan areal reboisasi yang dilakukan di Kabupaten Enrekang sejak tahun 2001 seluas 300 ha, tahun 2002 seluas 200 ha. Pada tahun 2003 telah dilakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan. Luas areal yang telah dilakukan untuk reboisasi seluas 100 ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 314 ha. Pada tahun 2004 areal reboisasi seluas 100 dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2025 ha.

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan selama ini belum mampu mengimbangi laju peningkatan degradasi hutan dan lahan. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya satu perencanaan makro yang bersifat holistik yang mampu secara efektif mengintegrasikan dan mensinerjikan berbagai aspek dalam pengelolaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan selama ini masih kurang terarah dan tidak tepat sasaran sehingga hasilnya belum optimal. Penentuan lokasi prioritas kegiatan, pola tanam, jenis tanam dan jarak tanam masih perlu diperbaiki dan diarahkan pada sasaran dan tujuan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang tepat. Dengan pula dengan pola pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan yang belum berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal masih perlu perbaikan.

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dari program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang, diperlukan adanya satu master plan (secara makro) yang bersifat holistik integratif dan berbasis pada kondisi nyata sumber daya hutan dan lahan serta kondisi sosial budaya masyarakat lokal melalui pendekatan ekosistem.

3.2.2. Daerah Aliran Sungai

Di Kabupaten Enrekang, terdapat 4 (empat) sub DAS yaitu sub DAS Mata Allo, Sub DAS Malua, Sub DAS Saddang dan Sub DAS Bila.

- DAS Mata Allo

Catchment area DAS Mata Allo berhulu di gugusan pegunungan Toraja bagian selatan meliputi Buttu Damai (1.541 m), Buttu Benteng Alla (1.562 m) dan Buttu Kandeang Manuk (1.004 m). Sub DAS Mata Allo mencakup Salu Kidang dan Salu Dolok. Panjang sungai diperkirakan sepanjang 65 km. Hilir Mata Allo di wilayah tontonan pertemuan dengan Sungai Malua.

- DAS Malua

Hulu Sub DAS Malua ini adalah gugusan Pegunungan Latimojong sebelah Utara yaitu Buttu Sinaji (2.349 m) dari permukaan laut pada sebelah Barat dalam wilayah Kabupaten Luwu (Bastem) dan Tana Toraja (Mengkendek). Sebelah Timur dengan Buttu Seranglangkang (2.095 m) dpl, Buttu Pokahpinjang (2.970 m) dan sisi sebelah Selatan adalah Buttu Pinta (2.178 m), Buttu Tombang (1.783 m). Hilir Malua berakhir di Tontonan, selanjutnya menyatu dengan Sub DAS Mata Allo. Luas cakupan sekitar 32.612 ha dengan panjang sungai utama diperkirakan sekitar 97 km termasuk Sungai Pasui.

- DAS Saddang

Sub DAS Saddang masuk dalam wilayah Kabupaten Enrekang, dengan hulu di gugusan pegunungan Toraja bagian Selatan (Bongga Karadeng) dan sebelah Barat meliputi Buttu Rea (1.574 m), Buttu Kau (1.007 m). Sedangkan sebelah Timur adalah Buttu Paladang (1.611) dan Buttu Padamarang (1.774 m). Hilir Sub DAS Saddang adalah pertemuan sungai Mamasa dan sungai Mata Allo di wilayah Kabupaten Enrekang.

- DAS Bila

Das Bila masuk dalam wilayah kecamatan Maiwa hingga ke perbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang. Hulu DAS Bila berada pada pegunungan Samaurang (1.3468 m), Buttu Setang (1.340 m) dan Buttu Dejang membentuk sungai-sungai kecil dan masuk ke Sungai Cenrana.

Daerah Aliran Sungai Isu yang mengemuka

- o Terjadinya degradasi hutan terus meningkat akibat aktivitas manusia
- o Akibat tekanan penduduk yang tiap tahun semakin bertambah.
- o Penggunaan lahan di daerah hulu DAS
- o Banjir dan kekeringan yang cenderung semakin meningkat
- o Erosi dan sedimentasi pada bagian hulu DAS

Kotak 3.3

Keadaan topografi pada wilayah DAS di Kabupaten Enrekang cukup bervariasi dari topografi ringan (datar) sampai topografi berat (bergunung) dengan kemiringan landai (1-5%) sampai berat (>45%) serta panjang lereng yang cukup bervariasi, areal topografi berat (pegunungan) mendominasi areal yakni seluas 98.583 ha atau sekitar 55,52 % dari seluruh wilayah sub DAS di Kabupaten Enrekang.

DAS Rekomendasi

- o Rehabilitasi pada areal lahan dengan reboisasi tanaman hutan,
- o Rehabilitasi dengan pola agroforestry
- o Penanaman dan pemeliharaan pada bantaran sungai
- o Pembuatan peraturan tentang pengelolaan DAS
- o Agar peraturan dapat berjalan sesuai harapan, perlunya sosialisasi kepada masyarakat

Kotak 3.4

Kondisi topografi wilayah DAS di Kabupaten Enrekang sangat menunjang untuk timbulnya dampak yang tidak diinginkan terhadap komponen lingkungan lahan dan tata air dan komponen lingkungan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.

3.2.3. Kawasan Perlindungan/Non Budidaya

Kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Enrekang, terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi terbatas (HPT). Berdasarkan peta paduserasi tahun 1999 luas hutan lindung di Kabupaten Enrekang seluas 81.940 ha dan hutan produksi terbatas seluas 7.075 ha, sedangkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 276 tahun 1999, luas hutan lindung seluas 72.755 ha dan hutan produksi terbatas seluas 14.597 ha atau terdapat selisih luas hutan lindung seluas 9.185,12 ha dan hutan produksi terbatas 7,522,42 ha (Rencana Makro Dishut Propinsi, 2000).

Kawasan hutan yang terdapat di Kabupaten Enrekang tersebar pada beberapa wilayah Kecamatan yaitu Enrekang, Maiwa, Anggeraja, Baraka dan Alla. Luas kawasan hutan di Kabupaten Enrekang tahun 2003 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil interpretasi citra landsat tahun 2002, penutupan lahan di Kabupaten Enrekang didominasi oleh hutan sekunder (seluas 55.948 ha), pertanian lahan kering campur semak seluas 48.101 ha, sedangkan hutan primer hanya sekitar 463 ha.

3.3. Lingkungan Buatan

3.3.1. Kawasan Penambangan

Kegiatan penambangan yang terdapat di Kabupaten Enrekang adalah kegiatan penambangan golongan C dengan jumlah pengusaha tambang pada tahun 2003 adalah 22 yang tersebar pada beberapa kecamatan yaitu terdapat 8 pengusaha tambang di Kecamatan Enrekang, 6 pengusaha tambang di Kecamatan Cendana, 3 pengusaha tambang di

Kecamatan Alla, masing-masing 2 pengusaha tambang di Kecamatan Maiwa dan Anggeraja dan terdapat 1 pengusaha tambang di Kecamatan Malua. Pada umumnya perusahaan tambang tersebut mengelola jenis bahan galian pasir dan kerikil.

Pada Tahun 2003 sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan riil sekitar 7,34 persen. Angka ini angka pertumbuhan tertinggi yang dicapai selama empat tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan pada sektor bangunan yang juga merupakan pertumbuhan tertinggi untuk sektor ini.

Kerusakan lingkungan yang diperkirakan akan timbul dari kegiatan penambangan pasir dan kerikil adalah degradasi dasar sungai, erosi tebing sungai. Penambangan pasir dan kerikil di badan sungai secara tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sungai berupa pengaliran air secara tidak terkendali dan meningkatnya laju erosi tebing sungai yang merusak prasarana yang telah dibangun pada sisi badan sungai. Tidak ada data mengenai jumlah hasil tambang yang dilakukan pada masing-masing penambang di Kabupaten Enrekang.

3.3.2. Kawasan Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan sektor basis bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Hal ini dapat dilihat dari lapangan usaha masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian yakni sebesar 80,84 persen. Jenis komoditi yang diusahakan masyarakat berupa tanaman bahan makanan pokok seperti padi, ubi kayu, tanaman kacang-kacangan, sayur-sayuran, tanaman buah-buahan seperti pepaya, salak, markisa, nenas, rambutan, jeruk, durian.

Luas lahan persawahan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 seluas 8.819 ha yang terdiri dari sawah dengan irigasi sederhana (2.162 ha), sawah irigasi desa (2.711 ha) dan sawah tadah hujan (3.754ha). Terjadi peningkatan luas persawahan di daerah ini dari tahun 2002 sebesar 8.531 ha menjadi 8.819 ha pada tahun 2004.

Berdasarkan sistem pengairan di Kabupaten Enrekang, pengelolaan sawah terbagi atas: irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU dan tadah hujan. Pengelolaan sawah di daerah ini umumnya dilakukan dengan sistem tadah hujan, dengan satu kali tanam dan terdapat pula pengelolaan dengan dua kali tanam.

Luas lahan sawah tadah hujan dari tahun 2001 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, luas sawah tadah hujan 3.493 ha meningkat menjadi 3.731 ha pada tahun 2002, dan meningkat pada tahun 2003 seluas 3.823 ha. Namun demikian terjadi penurunan seluas 64 ha menjadi 3.754 ha pada tahun 2004, hal ini disebabkan karena lahan sawah tidak diusahakan.

Luas sawah dengan sistim irigasi sederhana, umumnya dikelola dua kali setahun. Perkembangan luas lahan sawah irigasi sederhana dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan seluas 5 ha, dari 2.167 ha tahun 2001 menjadi 2.167 tahun 2004.

Demikian pula dengan sawah dengan sistim tadah hujan, terjadi peningkatan pengelolaan sawah dari 3.493 ha pada tahun 2001, meningkat menjadi 3.731 ha pada tahun 2002, terjadi peningkatan pada tahun 2003 seluas 3.823 ha dan pada tahun 2004 terjadi penurunan sebanyak 64 ha atau seluas 3.754 ha. Hal ini terjadi karena sebanyak 64 ha sementara tidak dikelola/diusahakan.

Penyebaran luas sawah di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Baraka menempati posisi paling luas dengan luas sawah sekitar 2.659 ha atau 30,15 persen, disusul Kecamatan Curio dengan luas 1.077 ha atau 12,21 persen, Kecamatan Enrekang dengan luas 737 ha atau 8,36 persen. Sedangkan Kecamatan Cendana merupakan kecamatan yang terkecil yaitu dengan luas 310 ha atau sekitar 3,51 persen dari luas sawah di Kabupaten Enrekang.

Produksi padi sawah dalam empat tahun terakhir dari tahun 2000 hingga 2003 terus mengalami penurunan hampir dua kali lipat, baik dari segi luas lahan yang diusahakan maupun produksi yang dicapai. Jika pada tahun 2000, luas lahan padi sawah yang diolah 12.188 ha dengan produksi padi sebesar 60.783,59 ton, maka pada tahun 2003 luas lahan yang diolah 7.289 ha dengan produksi sekitar 35.262,57 ton. Pengelolaan lahan yang semakin tahun berkurang kemungkinan diakibatkan karena lahan tidak dikelola oleh pemiliknya (merantau).

Perkembangan luas lahan untuk tanaman palawija, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan tanaman makanan lainnya menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Tanaman Bahan Makanan (tabama) mencakup berbagai komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman bahan makanan lainnya, menunjukkan perkembangan angka yang berfluktuasi, beberapa komoditas mengalami penurunan dan juga terdapat komoditas yang mengalami kenaikan.

Jenis perkebunan rakyat yang dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah : kelapa, kopi, kapok, cengkeh, pala, lada, kakao, kemiri, jambu mete, tembakau, vanili, aren dan kayu manis. Adapun luas

lahan perkebunan rakyat pada tahun 2003 adalah sekitar 26.684 ha. Luas lahan perkebunan rakyat mengalami kenaikan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Tahun 2001 luas lahan adalah sekitar 25.431 ha, naik menjadi 26.493 pada tahun 2002.

Total produksi yang dicapai dari hasil perkebunan rakyat selama tahun 2003 adalah sebesar 11.745 ton. Dibanding pada tahun 2001, produksi hasil perkebunan rakyat di Kabupaten Enrekang juga mengalami kenaikan dari 10.348 ton menjadi 10.952 ton pada tahun 2002.

Dengan melihat aspek tanaman perkebunan di Kabupaten Enrekang, laju pertumbuhan riil untuk sub sektor tanaman ini pada tahun 2003 adalah sekitar 5,64 persen dan secara keseluruhan sektor pertanian hanya tumbuh 4,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sub sektor tananam perkebunan belum mampu mengimbangi peranan sub sektor tanaman bahan makanan terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian.

Dengan melihat jenis komoditi yang ada di Kabupaten Enrekang selama tahun 2003, komoditas kopi dan kakao merupakan salah satu komoditas andalan yang juga merupakan komoditas unggulan yang diekspor. Tahun 2003 jenis komoditi kopi mengalami kenaikan produksi sebesar 5.830 ton dibanding pada tahun 2002 sebesar 3.947 ton. Sedangkan jenis komoditi kakao terjadi penurunan hasil dari tahun 2003 sebesar 2.234 ton menjadi 3.337 ton pada tahun 2002. Penurunan produksi kakao disebabkan serangan hama dan penyakit yang hampir merata pada seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Implikasi dari terjadinya peningkatan produksi pada beberapa komoditas pada tahun 2003 adalah terjadinya pertumbuhan rill yang cukup baik pada sub sektor tanaman bahan makanan, yakni sekitar 4,39 persen.

Pertumbuhan yang relatif masih cukup baik pada komoditas sayur-sayuran cukup menopang pertumbuhan riil pada sub sektor ini.

Dampak pada komponen lingkungan yang diperkirakan akan timbul dari kegiatan pertanian bersumber dari penggunaan pupuk buatan dan pestisida. Jika semua sawah dipupuk sesuai dengan dosis anjuran maka pada tahun 2004 yaitu 90 -135 N/ha atau 200 - 300 kg urea/ha maka jumlah urea yang dipaparkan ke lahan persawahan adalah 432,400 - 648,600 ton untuk luasan 2.162 sawah beririgasi sederhana dan 750,800 - 1.126,200 ton untuk luasan 3.754 sawah tadah hujan. Untuk jenis pupuk Phosphor (SP-26) dengan kebutuhan sesuai dengan anjuran adalah 75 -135 kg/ha. Dengan demikian penggunaan pupuk SP-26 di Kabupaten Enrekang adalah dengan luasan persawahan yang telah disebutkan adalah 162,150 - 291,870 ton (sawah irigasi sederhana) dan 281,550 - 506,790 ton (sawah tadah hujan).

Dampak lingkungan dari kegiatan pertanian tidak saja berasal dari penggunaan pupuk dan pestisida tetapi juga dapat menimbulkan dampak berupa peningkatan laju erosi terutama pada kegiatan pertanian di lahan kering pada bentang lahan yang berlereng. Pemanfaatan lahan pertanian pada bentang lahan berlereng terjal sangat sulit untuk dihindari mengingat kondisi topografi wilayah Kabupaten Enrekang berombak sampai berlereng terjal, didominasi oleh wilayah dengan kelerengan > 45 % seluas 90.212 ha, wilayah datar sampai dengan landai hanya seluas 29.938 ha selebihnya adalah wilayah berbukit sampai bergunung. Dengan kondisi topografi tersebut maka kegiatan pertanian harus menerapkan teknologi konservasi tanah dan air.

3.3.3. Kawasan Peternakan

Pada tahun 2003 sub sektor peternakan Kabupaten Enrekang tumbuh sekitar 2,38 persen. Pertumbuhan yang dicapai di sub sektor ini ditopang oleh adanya peningkatan populasi ternak yang cukup baik, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan populasi ini baik pada ternak besar, ternak kecil, maupun unggas. Pada ternak besar misalnya, pada tahun 2002 populasi sapi di Kabupaten Enrekang adalah sebanyak 31.081 ekor, dan ternak kecil seperti kambing mengalami peningkatan yang cukup besar. Jika pada tahun 2002 populasi kambing masih sebanyak 24.292 ekor, maka pada tahun 2003 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 41.375 ekor. Demikian juga halnya dengan populasi unggas misalnya ayam buras yang pada tahun 2002 populasinya sebanyak 295.665 ekor, pada tahun 2003 populasi meningkat menjadi sebanyak 354.796 ekor. Hal serupa terjadi pula pada populasi ayam ras yang pada tahun 2002 jumlahnya adalah sebanyak 100.000 ekor, maka pada tahun 2003 populasinya menjadi sebanyak 325.711 ekor.

Kasus flu burung dan antrax akibat dari ternak unggas/burung dan hewan ternak sapi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam kunjungan Menteri Pertanian ke Sulawesi Selatan di Makassar, ada lima hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran antrax dan flu burung. Kelima hal itu : pertama, semua kabupaten/kota di Sulsel mengaktifkan rumah sakit dan rujukannya terhadap kasus antrax dan flu burung, kedua, semua RPH harus dibenahi hingga semua hewan di RPH dapat dijamin kesehatannya dan hal itu harus dipertanggung jawabkan oleh dokter hewan yang bertugas selama 24 jam, ketiga, untuk daerah endemik antrax, RPH disterilkan dan ditutup selama 1 bulan, keempat, muspida dan kepolisian

mengawasi lalu lintas ternak antar daerah/pulau dengan mengintensifkan kartu sehat hewan yang menyatakan hewan itu sehat, sudah divaksin dan menjelaskan asal hewan dan kelima, tidak mengkonsumsi hewan yang dipotong di luar RPH. (Harian Fajar, Kamis, 24 November 2005 hal 1 & 9).

3.3.4. Kawasan Perindustrian

Industri di Kabupaten Enrekang, hanya pada tingkat industri menengah dan industri kecil. Data Kabupaten Enrekang Dalam Angka menunjukkan bahwa tahun 2003, terdapat 4 perusahaan menengah dan 159 perusahaan kecil.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Enrekang masih tergantung pada kelompok industri kecil dan rumah tangga. Jumlah perusahaan/usaha industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Enrekang, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini terus mendorong terjadinya pertumbuhan riil untuk sektor industri dari tahun ke tahun.

3.4. Beban Pencemaran

3.4.1. Pencemaran air

Sumber pencemar air yang paling utama pada badan sungai adalah sedimen, hal tersebut terindikasi dari kekeruhan air pada sungai-sungai utama di Kabupaten Enrekang. Sumber sedimen berasal dari pengikisan/erosi pada daerah aliran sungai (DAS) Saddang, Mata Allo, Bila - Boya dan Malua.

Sumber pencemar air lainnya dapat berasal dari penggunaan pupuk dan pestisida pada areal pertanian, namun sampai saat ini belum tersedia

data tentang pencemaran air yang bersumber dari penggunaan pupuk dan pestisida.

Penggunaan pupuk buatan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2003 mengalami penurunan di banding tahun 2002, data penyaluran pupuk urea tahun 2002 sebesar 3.139 ton menurun menjadi 1.679 ton pada tahun 2003, penggunaan SP-36 juga mengalami penurunan dari 773 ton pada tahun 2002 menurun menjadi 149 ton pada tahun 2003. Jenis pupuk ZA menurun dari 424,7 ton pada tahun 2002 menurun menjadi 47,0 ton tahun 2003. Demikian pula dengan penggunaan pupuk KCL, penyaluran pupuk tersebut juga mengalami penurunan dari 320 ton pada tahun 2002 menurun menjadi 55 ton pada tahun 2003. (PT. Pupuk Sriwijaya Kantor Perwakilan Enrekang dalam BPS, 2003).

Adapun parameter fisik dan kimia air yang tersedia di Kabupaten Enrekang adalah *Biological Oxigen Demand* (BOD), *Chemical Oxigen Demand* (COD), kemasaman air (pH), dan kandungan sedimen. Data parameter tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Hasil analisis parameter kualitas air

Parameter	S. Malua		S. Mata Allo		S. Saddang	
	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
BOD (ppm)	2,10	2,50	3,10	2,75	2,95	2,90
COD (ppm)	4,49	4,90	5,75	4,85	5,45	5,70
pH	7,15	6,90	7,87	7,10	7,75	7,85
Sedimen (mg/l)	3,20	3,35	4,15	3,35	4,05	3,95

Sumber: Penyusunan Program Penanggulangan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan DAS di Kabupaten Enrekang, 2001

Mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51/MNLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair yang menetapkan bahwa baku mutu limbah cair untuk parameter BOD adalah 50 mg/liter, COD adalah 100 mg/liter, pH adalah 6-9. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis beberapa parameter kualitas air yang disajikan pada tabel

diatas menunjukkan bahwa kualitas air pada sungai utama di Kabupaten Enrekang masih mempunyai kualitas yang baik. Keterbatasan dari pada data tersebut adalah masih banyaknya parameter penentu kualitas air yang belum dianalisis.

3.4.2. Pencemaran Udara

Sumber bahan pencemar udara terutama dan lebih banyak banyak dihasilkan oleh industri-industri melalui cerobong asap. Udara yang kurang bersih dapat memicu timbulnya berbagai penyakit khususnya pada saluran pernafasan (ISPA), sehingga mempengaruhi kondisi udara artinya apabila konsentrasi bahan pencemar melebihi ambang batas (ambien) maka udara dikatakan tercemar sehingga dapat menurunkan dan memperburuk kualitas udara. Untuk mengetahui bahan pencemar udara dilakukan pengamatan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Kantor Bupati Enrekang, TPA Maiwa, pasar Sudu dan jalan poros Kabupaten Enrekang. Parameter kualitas udara akan diamati adalah kandungan partikel debu dan gas-gas di udara (CO, NO₂ dan SO₂).

Data hasil pengukuran kualitas udara selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional berdasarkan PP. No.14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan, Pengendalian, Pencemaran Air, Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi serta Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Hasil pengamatan kualitas udara menunjukkan bahwa seluruh lokasi yang dijadikan lokasi pengambilan sampel kualitas udara masih di bawah ambang batas udara nasional (baku mutu nasional) untuk bahan pencemar seperti kandungan CO, SO₂, dan NO_x, tetapi pengamatan yang dilakukan pada bulan Oktober 2005 dan pada tanggal 18 Oktober 2006 konsentrasi bahan pencemar NO_x mengalami peningkatan konsentrasi.

Lokasi tersebut adalah di dekat Pasar Sudu, Kantor Bupati Enrekang, dekat poros Jalan Raya Enrekang. Sedangkan bahan pencemar CO dan SO₂ mengalami penurunan kadar konsentrasi.

3.4.3. Pencemaran limbah padat

Pencemaran limbah padat dapat berasal dari pemukiman, industri, pasar dan pusat perdagangan lainnya serta industri. Limbah padat di Ibukota Kabupaten Enrekang di angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh armada truk.

Tempat Pembuangan Sampah (TPA) di Kabupaten Enrekang, terdapat dua lokasi yaitu TPA Maiwa/Enrekang berada di Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa dan TPA Bolang berada di desa Bolang Kecamatan Alla.

TPA Maiwa dengan luas lahan sekitar 6,600 m² melayani pengangkutan sampah pada wilayah kecamatan Enrekang dan kecamatan Maiwa. Sampah yang dihasilkan dari penduduk umumnya adalah sampah organik dengan volume sampah setiap hari 135,81 m³ pada kecamatan Enrekang dan 15,5 m³ pada kecamatan Maiwa. Dari total volume sampah yang dihasilkan pada kedua kecamatan tersebut (151,31 m³), hanya 44 m³ sampah yang terangkut atau hanya sekitar 29,08 persen, sedangkan sisanya 70,92 persen masih bertumpuk pada beberapa di TPS di Kecamatan Enrekang dan Maiwa.

TPA Bolang dengan luas lahan 1.260 m² melayani pengangkutan sampah pada wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla dan Kecamatan Baraka. Jumlah sampah yang dihasilkan pada ketiga kecamatan tersebut adalah sekitar 64,80 m³ per hari, sedangkan volume sampah yang

diangkut hanya 33 m³ perhari atau sekitar 50,93 persen dan sisanya 49,07 persen masih bertumpuk di TPS pada ketiga kecamatan yang dilayani.

Pada kunjungan ke TPA Bolang di Desa Bolang, tidak ditemukan adanya aktivitas pembuangan sampah dan belum ada sampah yang terbangun di lokasi tersebut. Kondisi jalan yang belum beraspal dapat menyulitkan pengangkutan sampah. Dari hasil pantauan, sampah yang diangkut dari kecamatan Alla, Anggeraja dan Baraka dibuang di lokasi tempat pembuangan sementara pada jalan poros menuju ke Sudu. Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka akan dapat mengganggu pengaliran air masuk ke badan sungai.

Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari pada seluruh wilayah di Kabupaten Enrekang sebesar 216,11 m³ per hari sedangkan jumlah sampah yang terangkut hanya sekitar 77 m³ setiap hari atau hanya sekitar 35,63 persen, sedangkan sisanya sekitar 64,37 persen masih tersisa. Dengan jumlah armada truk sebanyak 3 buah, maka masalah sampah akan menjadi masalah yang serius dimasa akan datang. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena akan berdampak pada pemukiman penduduk

3.4.4. Degradasi lahan

Degradasi lahan dapat terjadi oleh karena proses pengikisan erosi. Faktor penentu erosi adalah curah hujan, kondisi topografi, sifat tanah dan penutupan tanah. Semua faktor tersebut, kondisinya di mempunyai potensi yang cukup besar. Umumnya bentang lahan yang ada di daerah ini berlereng terjal sampai sangat terjal dengan luasan lebih dari 80 persen dari total luas Kabupaten Enrekang, selain itu faktor penutupan

lahan berupa hutan yang luasannya semakin berkurang sehingga potensi erosi sangat besar dan lahan rentan terdegradasi.

Potensi erosi semakin besar dengan pemanfaatan lahan berlereng terjal sebagai areal pertanian tanpa penerapan konservasi tanah dan air yang cukup tepat sehingga dapat menekan laju erosi.

3.4.5. Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Enrekang yang memiliki luas wilayah 1.786,9 km² atau 2,8 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Alla, Anggeraja, Maiwa, Enrekang dan Baraka, namun sejak tahun 2000 telah mengalami perkembangan menjadi 9 kecamatan dengan 4 kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari kecamatan Maiwa yaitu Bungin dan pemekaran dari kecamatan Enrekang yaitu Cendana serta pemekaran kecamatan Anggeraja yaitu Kecamatan Malua, pemekaran kecamatan Alla yaitu Kecamatan Curio.

Wilayah Kabupaten Enrekang berdasarkan penggunaan lahan terdiri dari hutan negara sebesar 43.731 ha atau 24,48 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Enrekang yaitu 178.6021 ha. Penggunaan lahan untuk hutan merupakan luas yang terbesar dibandingkan dengan penggunaan lainnya. Selain hutan negara, di kabupaten Enrekang juga terdapat lahan untuk penggunaan hutan dalam bentuk hutan rakyat. Besarnya luas lahan hutan tentunya akan memberikan pengaruh terhadap keragaman jenis flora dan fauna.

Berdasarkan letaknya, maka kawasan hutan di Kabupaten Enrekang umumnya berada pada daerah hulu yang berkaitan dengan keberadaan gunung Latimojong. Potensi keragaman jenis yang cukup tinggi yang

terdiri dari jenis flora dan fauna yang endemik. Jenis fauna yang endemik dan dilindungi yang terdapat di Kabupaten Enrekang adalah jenis kera ekor panjang (*Macaca tongkeana*), Biawak (*Varanus sp*) serta Rusa (*Cervus sp*). Jenis ini sudah sangat jarang ditemukan oleh masyarakat, karena beberapa tempat yang merupakan habitat bagi jenis tersebut telah mengalami gangguan atau perubahan sehingga jenis ini cenderung melakukan migrasi ke tempat yang lebih aman seperti ke daerah-daerah hulu. Jenis fauna dari kelompok aves (burung) antara lain puyuh (*Coturnis sp*), gereja (*Passer montanus*), Burung hantu (*Tyto sp*) dan tekukur (*Streptopelia chinensis*), Rankong, burung raja udang, itik liar, alo-alo tikus, elang, kupu-kupu raja. Sedangkan dari jenis reptilia terdiri dari jenis ular yaitu sanca (*phyton sp*) kadal (*Hydrosaurus sp*) dan tokek hutan (*Gecko sp*), Anoa, Katak raksasa, Capili, Alo, Ayam hutan, Cakkurak, Balibong, Kapodan (Cakkuridi), Cincing, Tekukur hutan, Lekkan (Elang bondol).

Flora yang terdapat di Enrekang cukup beragam berdasarkan tempat tumbuhnya. Pada daerah yang merupakan hutan alam, flora yang ada merupakan jenis alami yang membentuk tegakan dengan struktur dan komposisi yang cukup beragam. Berdasarkan struktur vertikal tegakan, maka pada kawasan hutan alam, masih terdiri dari empat strata tajuk. Adapun jenis flora antara lain Kecapi (*Sandoricum koetjapi*), bangkele (*Nuclea orientalis*), Kenari (*Canarium aspernum*), Pulai (*Alstonis scolaris*), aren (*Arenga Pinnata*), Rao (*Dracontomelon dao*) dan Bantje (*Trema orientalis*).

Adanya potensi keragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Enrekang, merupakan sumberdaya penting untuk dijadikan sebagai modal dasar dalam pengembangan untuk berbagai keperluan, terutama sebagai sumber plasma nutfah serta sebagai suatu komponen dari sistem

penyangga kehidupan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber yang mempunyai nilai ekonomi.

Kecenderungan semakin berkurangnya keragaman hayati mulai nampak dengan indikator bahwa jenis tertentu yang dahulu merupakan jenis fauna dan flora yang dikenal dan dijumpai oleh masyarakat, semakin berkurang dan tidak lagi dapat dijumpai oleh masyarakat. Kondisi ini sebagai akibat dari kegiatan pemanfaatan lahan yang mengakibatkan gangguan terhadap habitat flora dan fauna. Jenis rusa dan anoa merupakan contoh nyata yang saat ini sangat sulit lagi dijumpai, bahkan kemungkinan populasi ini semakin menipis walupun jenis ini merupakan jenis yang termasuk di lindungi.

3.5. Lingkungan Sosial

3.5.1. Sosial Budaya

a. Kependudukan

- Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Data Kabupaten Enrekang Dalam Angka yang dilakukan dari tahun 1998, penduduk Kabupaten Enrekang terus menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 1998 jumlah penduduk mencapai 160.731 jiwa, lima tahun kemudian pada tahun 2001 jumlahnya meningkat menjadi 169.203 jiwa. Pada tahun 2004, berdasarkan hasil Statistik 2004, jumlah penduduk Kabupaten Enrekang sebesar 182.898 jiwa. (BPS, 2004)

- Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Perbedaan sumber daya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sebaran penduduk. Biasanya penduduk akan berkumpul pada suatu wilayah yang dapat menunjang kehidupannya.

Distribusi penduduk selama tahun 2004 menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang masih terkonsentrasi di Kecamatan Alla dengan persentase penyebaran penduduk sebesar 22.67 persen disusul kecamatan Baraka sebesar 17.43 persen dan kecamatan Enrekang sebesar 15.92 persen. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bungin yaitu 4.103 jiwa atau 2,24 persen. (BPS, 2004)

Kecamatan Alla merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya dengan jumlah kepadatan sebesar 280 jiwa per km², disusul kecamatan Malua sebesar 199 jiwa per km² dan kecamatan Anggeraja sebesar 181 jiwa per km². Tingginya angka kepadatan penduduk di Kecamatan Alla disebabkan karena wilayah ini termasuk daerah potensial untuk pengembangan pertanian, sehingga menarik bagi penduduk untuk bermukim di daerah ini. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya peningkatan sumber-sumber ekonomi pada setiap wilayah kecamatan sesuai potensi yang dimilikinya, sehingga pemerataan kegiatan ekonomi pada setiap wilayah dapat dicapai.

- Struktur Penduduk

Struktur penduduk dapat ditinjau menurut jenis kelamin maupun umur. Kajian struktur penduduk sangat penting bagi pengambil keputusan dalam merencanakan pembangunan berbagai fasilitas pelayanan penduduk, terutama yang berkaitan dengan pelayanan umum, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas sosial lainnya.

- Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (RJK) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Angka RJK yang lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Pada tahun 2004, kondisi penduduk laki-laki menjadi lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,57 persen. Hal ini karena jumlah penduduk laki-laki cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

- Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selama periode 1999 dan 2004, struktur umur penduduk Kabupaten Enrekang mengalami pergeseran, yaitu dari penduduk muda menjadi penduduk peralihan, yaitu peralihan dari penduduk muda menuju penduduk tua. Perubahan struktur penduduk menurut umur ini di gambarkan sebagai berikut.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif memberikan indikasi bahwa jumlah penduduk usia sekolah lanjutan dan jumlah tenaga kerja semakin bertambah. Hal ini harus diantisipasi oleh pembuat kebijakan terutama yang bersangkutan paut dengan pendidikan dan tenaga kerja.

b. Fertilitas

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah di pengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (*migrasi*). Fertilitas adalah istilah yang umum digunakan untuk mengindikasikan banyaknya anak yang lahir hidup.

Tingkat Fertilitas dapat diukur dengan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate = TFR*). TFR adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, menurut kelompok umurnya pada tahun yang bersangkutan.

c. Mortalitas

Kematian atau mortalitas merupakan komponen demografi yang juga mempengaruhi dinamika kependudukan. Bila fertilitas berhubungan dengan penambahan penduduk, maka mortalitas merupakan pengurangan dari penduduk. Tingkat kematian yang terjadi umumnya berbeda menurut golongan umur, jenis kelamin maupun keadaan sosial ekonomi penduduk. Dengan demikian tingkat kematian yang terjadi di suatu wilayah seringkali dihubungkan dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi wilayah tersebut.

Semakin baik kondisi sosial ekonomi suatu wilayah ditunjang dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan, maka akan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat. Implikasinya angka kesakitan dan angka kematian dapat diperkecil.

d. Ketenagakerjaan

Arah kebijaksanaan tenaga kerja di Kabupaten Enrekang adalah (a) meningkatkan kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pembinaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai macam tingkat keahlian dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan yang ada, (b) meningkatkan dan merumuskan sistem mekanisme distribusi tenaga kerja sesuai dengan sektor pembangunan, peningkatan pemanfaatan tenaga kerja antar sektor, serta pelibatan dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, (c) meningkatkan peluang

kesempatan kerja dalam upaya perluasan dan penggunaan tenaga kerja (d) meningkatkan perlindungan sistem jaringan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja (Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang, 2000).

Guna mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan, perlu dipahami tentang kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Enrekang. Kondisi ketenagakerjaan yang akan dikaji berikut ini adalah angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

- Angkatan Kerja

Dalam konsep ketenagakerjaan BPS, penduduk berumur 15 tahun ke atas disebut sebagai penduduk usia kerja atau biasa disebut dengan tenaga kerja. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan atau disebut penduduk yang aktif secara ekonomi sedangkan sisanya yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (cacat, penerima pendapatan dan lain sebagainya) atau digolongkan sebagai bukan angkatan kerja.

- Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa di Kabupaten Enrekang selama dua tahun terakhir, secara faktual menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi persentase lapangan kerja.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan tampaknya masih akan menghadapi masa suram, hal ini terutama karena tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju kesempatan kerja, akibatnya angka pengangguran penduduk khususnya usia 15-64 tahun di Kabupaten Enrekang masih relatif rendah, yaitu sebesar 1,16 persen dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Walaupun

angka ini masih kecil, masalah pengangguran dikhawatirkan akan berkembang pada hal-hal yang lebih substansial, misalnya timbulnya konflik ataupun kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas nasional. Masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua golongan. (BPS, 2003)

Perkembangan ketenagakerjaan secara selintas dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja disebut tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dalam hal ini usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi TPAK maka semakin besar keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja.

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan seseorang dalam sektor perekonomian artinya seseorang berpendidikan tinggi akan memotivasi dirinya untuk terjun ke pasar kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Enrekang tahun 2000 tercatat 60,62 persen artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif, 60 orang diantaranya adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) sedang sisanya sebanyak 49,38 orang, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja .

Walaupun TPAK perempuan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi TPAK laki-laki tetap lebih besar 63, persen sedangkan TPAK perempuan tercatat sekitar 37 persen atau dengan kata lain TPAK laki-laki mencapai hampir dua kali lipat TPAK perempuan. Hal ini terjadi karena laki-laki, mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah bagi keluarga,

sedangkan perempuan sesuai dengan kodratnya lebih terfokus pada urusan rumah tangga.

- **Bukan Angkatan Kerja**

Selain informasi angkatan kerja, menampilkan penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, mereka terdiri dari : sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (penerima pendapatan, pensiun, cacat dan sebagainya) seperti yang telah disebutkan pada sub bab terdahulu.

- **Tingkat Pengangguran**

Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja baru dalam sektor kegiatan ekonomi, akan menyebabkan terjadinya masalah ketenagakerjaan. Jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan juga dapat diartikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

e. Pendidikan

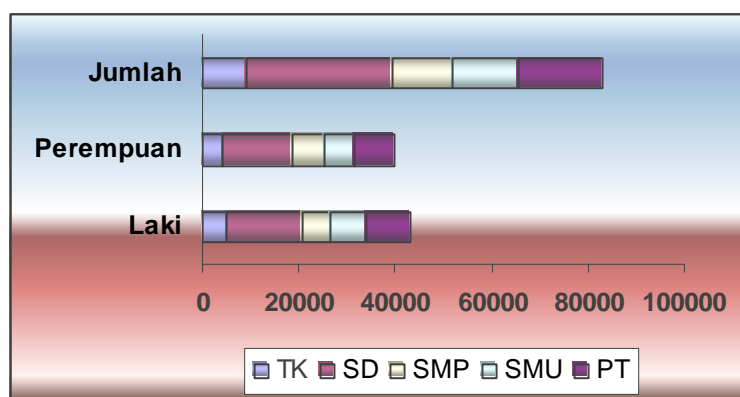
Pendidikan mempunyai peran penting, karena pendidikan memiliki andil yang besar terhadap kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan di Kabupaten Enrekang, berikut ini akan diulas mengenai status pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan yang merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan tingkat pendidikan.

- **Status Pendidikan**

Peningkatan pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka

wawasannya pada seluruh aspek kehidupan juga akan meningkat. Sebagaimana diketahui sumber daya alam, termasuk di dalamnya faktor lingkungan memiliki faktor ekonomis yang tidak kecil. Karena itu dengan wawasan yang luas, diharapkan pemahaman akan pentingnya mengelola lingkungan yang baik akan semakin meningkat.

Penduduk Kabupaten Enrekang berumur 5-24 pada tahun 2004 yang perkiraan penduduk usia sekolah sebesar 76.930 jiwa dimana penduduk laki-laki 51.72 persen dan perempuan 48.27 persen. Sebanyak 36,55 % usia sekolah berada pada tingkat sekolah dasar, 20,80 % berada pada tingkat perguruan tinggi, 16,70 % berada pada tingkat sekolah lanjutan, 14,76 % berada pada tingkat sekolah lanjutan pertama dan hanya 11,19 % berada pada tingkat taman kanak-kanak. (BPS, 2004).



Gambar 3.1. Penduduk usia sekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, di Kabupaten Enrekang 2004

- Sarana Pendidikan

Membangun masyarakat berkualitas dan menyeluruh perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, akhir-akhir ini sarana pendidikan yang disiapkan oleh pihak

pemerintah dan swasta perkembangannya sangat pesat. Hampir di setiap sudut dijumpai sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai ke Perguruan Tinggi (PT). Menjamurnya sekolah-sekolah memberi kesan yang baik bagi perkembangan pendidikan, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM).

- Jumlah Sekolah

Data tahun 2004 menunjukkan jumlah sekolah di Kabupaten Enrekang untuk tingkat Sekolah Dasar 290 buah, SLTP 27 buah, SMU 10 buah, dan terdapat satu buah Perguruan Tinggi Swasta.

- Ketersediaan Jumlah Guru

Pada dasarnya kemajuan suatu bangsa/daerah/wilayah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan erat kaitannya dengan ketersediaan dan kualitas guru serta ketersediaan fasilitas pendidikan lainnya. Di samping itu, faktor determinan lain yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan alam sekitarnya. Di Kabupaten Enrekang khususnya, pembangunan pendidikan telah menunjukkan hasil yang nyata. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan meningkatkan fasilitas pendidikan, program peningkatan kualitas guru, kejar paket A, kejar paket B dan program wajar dikdas 9 tahun.

Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas muridnya. Untuk meningkatkan derajat kualitas guru pada status yang lebih baik, maka telah dilakukan pendidikan seperti penataran penyeteraan Diploma II (D-II) untuk guru SD dan Diploma III (D-III) untuk guru SLTP. Dengan meningkatnya pengetahuan guru, diharapkan proses "transfer" ilmu pengetahuan pada anak didik akan menjadi lebih baik

dan lebih berkualitas.

Tahun ajaran 2004 terdapat 1.098 guru SD, sebanyak 609 guru SLTP dan 292 guru SLTA. Jumlah guru SD Negeri terbanyak berada di kecamatan Enrekang 248 orang dan terendah di kecamatan Bungin sebanyak 32 orang. Jumlah guru SLTP terbanyak berada di Kecamatan Alla sebanyak 123 orang dan terendah di Kecamatan Bungin 8 orang.

Rasio murid guru diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada jenjang sekolah yang bersangkutan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas, karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin rendah tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

f. Kesehatan

Status kesehatan menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor program dan pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat (gaya hidup), faktor keturunan dan faktor lingkungan. Menurut HL Blume, faktor yang paling dominan dan sangat mempengaruhi derajat kesehatan manusia adalah faktor lingkungan manusia itu sendiri.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa diperlukan suatu cara/upaya untuk menyehatkan lingkungan hidup manusia, yaitu dengan melakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan ini terutama yang berhubungan dengan lingkungan fisik yaitu air, tanah dan udara. Kegiatan sanitasi lingkungan dapat berupa penyehatan air minum, pembuangan dan pengolahan air kotor serta sampah, pemberantasan

faktor penyakit, sanitasi industri dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Indikator derajat kesehatan masyarakat yang relevan dengan kualitas lingkungan adalah angka kesakitan (*morbidity*), pola penyakit yang menonjol, angka kematian (*mortality*), penyakit-penyakit yang berbasis pengaruh lingkungan serta usia harapan hidup.

- Derajat Kesehatan

Angka harapan hidup penduduk merupakan suatu masa hidup yang diharapkan relatif panjang. Pada tahun 2002 angka harapan hidup untuk Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami kenaikan 68,6 tahun, sedangkan pada tahun 1999 sebesar 68,3 tahun. Kabupaten Enrekang pada tahun 2002, angka harapan hidup sebesar 72,7 tahun, mengalami kenaikan 0,7 tahun dibanding pada tahun 1999. (BPS, 2003).

Angka harapan hidup berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan masyarakat dan akses terhadap sarana kesehatan. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan derajat kesehatan dapat diartikan bahwa secara umum penduduk Kabupaten Enrekang dapat dikatakan lebih lama umurnya dibanding dengan kabupaten lain, situasi ini dicerminkan dengan penduduk yang tidak mencapai 40 tahun. Akan tetapi masalah air bersih di Kabupaten Enrekang masih tertinggal dengan kabupaten lain. Kemudian dilihat dari kemudahan ke sarana kesehatan dan kesehatan masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan Kabupaten Enrekang masih jauh tertinggal dengan kabupaten lain disisi lain kesadaran untuk mempersiapkan generasi penerus di Kabupaten Enrekang jauh lebih bagus dibandingkan dengan kabupaten lain yang diindikasikan dengan semakin tingginya balita berstatus gizi baik.

- Status Kesehatan

Perilaku masyarakat untuk berpola hidup sehat bisa menjauhkan dari berbagai keluhan kesehatan atau penyakit yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Artinya upaya pencegahan terhadap datangnya penyakit lebih penting dilakukan dari pada setelah mendapat penyakit kemudian baru pengobatinya.

Untuk itu banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang ada di masyarakat dapat dijadikan indikasi dalam melihat tingkat kesehatan dalam masyarakat.

Melihat masih banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tentunya harus diupayakan langkah-langkah konkrit yang berkaitan dengan penyuluhan serta pelayanan kesehatan atau dengan kata lain perlu ditingkatkan pelayanannya serta mensosialisasikan pola hidup sehat.

- Jumlah Penderita

Jumlah penderita/pasien menurut jenis penyakit yang diamati di Puskesmas di Kabupaten Enrekang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah penderita sebanyak 1.581 orang dibanding pada tahun 2003 sebanyak 1.161 orang. Berdasarkan uraian di muka tampak bahwa pola penyakit yang umum di derita dan pola penyakit penyebab kematian di Kabupaten Enrekang sebagaimana daerah tropis lainnya masih banyak disebabkan penyakit infeksi. Kenyataan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia di sekelilingnya. Jenis penyakit ini apabila dilihat dari epidemiologi lingkungan, sangat erat hubungannya dengan kualitas lingkungan, khususnya kualitas udara dan kualitas air bersih yang digunakan, serta ditambah dengan perilaku masyarakat yang kurang bersih. Disamping penyakit infeksi terdapat juga penyakit non infeksi yang

umumnya di pengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup masyarakat serta pengaruh dari bahan-bahan kimia. Penyakit non infeksi tersebut antara lain seperti tekanan darah tinggi, kanker, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit hati, penyakit ginjal dan lain sebagainya.

- Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan disini adalah institusi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung dan bersifat kuratif (pengobatan). Pada tahun 2004 sarana kesehatan di Kabupaten Enrekang sebanyak 286 buah yang terdiri atas 1 buah rumah sakit, 10 buah puskesmas, 38 buah puskesmas pembantu, 222 buah posyandu. Dibanding pada tahun 2003, fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah yaitu 257 buah. (Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, 2004).

- Tenaga Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, keamanan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar di Kabupaten Enrekang antara lain adalah dokter, dokter umum, dokter gigi. Juga terdapat bidan, dukun bayi serta kader pusat posyandu. Jumlah dokter yang bertugas pada tahun 2004 adalah 213 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter 14 orang, dokter gigi 2 orang, sarjana kesehatan 14 orang, tenaga bidan 45 orang, perawat umum 65 orang, perawat khusus gigi 10 orang. (Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2004)

3.5.2. Sosial Ekonomi

a. Keadaan Perekonomian Kabupaten Enrekang

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk menjaga agar perekonomian di daerah ini tetap tumbuh memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan. Hasil yang diperoleh ini tidak lain tentunya berkat kerja keras pemerintah maupun masyarakat. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi diharapkan hasil yang telah dicapai ini dapat terus berlanjut sehingga lebih meningkatkan kinerja ekonomi sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang adalah sekitar 4,90 persen, maka pada tahun 2003 bergerak naik dengan pertumbuhan sekitar 5,71 persen. (PDRB, Kab. Enrekang, 2004).

Selama kurun waktu tahun 1998 – 2003 struktur perekonomian Kabupaten Enrekang tidak banyak mengalami pergeseran yang berarti, dimana peranan sektor pertanian masih cukup dominan dengan peranan masih rata-rata di atas 47 persen. Tingginya kontribusi sektor pertanian ditunjang oleh sub sektor tanaman bahan manakan yang kontribusi rata-rata 32 persen per tahun, dan ini berarti bahwa sebagian besar penduduk di daerah ini perekonomiannya masih mengandalkan pertanian tanaman pangan.

Selain sektor pertanian, sektor yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang adalah sektor perdagangan, Hotel dan restoran dimana pada tahun 2003 memberikan andil sebesar 17,04 persen. Sektor jasa sebesar 13,95 persen diurutan ke tiga, sektor bank dan lembaga keuangan sebesar

5,74 persen.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Sebagai dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, data PDRB dapat menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan penyediaan faktor-faktor produksi lainnya menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Dalam penyajiannya PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga pada satu tahun tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

- Pertumbuhan PDRB

PDRB Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Enrekang masih sekitar 526.491,64 juta rupiah (atas dasar harga berlaku), maka pada tahun 2003 nilainya telah mencapai 587.356,48 juta rupiah, terjadi peningkatan sebesar 11,56 persen. (PDRB

Kab.Enrekang, 2004)

PDRB Kabupaten Enrekang terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, kontribusi PDRB kabupaten Enrekang masih relatif kecil yakni sebesar 1,46 persen pada tahun 2003. Angka ini mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2002 sebesar 1,44 persen.

- PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Selama enam tahun terakhir dari tahun 1998-2003, pendapatan penduduk Kabupaten Enrekang sekitar Rp. 2.149.058,46 menjadi Rp. 3.336.380,72 pada tahun 2003 atau meningkat menjadi sekitar 55,25 persen.

Laju pertumbuhan riil PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Enrekang periode 1993-2003, dimana pada kurun waktu tersebut pertumbuhan riil PDRB Perkapita tertinggi terjadi pada tahun 1996, dengan pertumbuhan riil sebesar 5,16 persen. Sedangkan laju pertumbuhan riil terendah terjadi pada tahun 1998 dengan pertumbuhan negatif sebesar -4,11 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan riil rata-rata perkapita penduduk Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 1993-2003 adalah sebesar 2,97 persen pertahun.

c. Transportasi

Jenis kendaraan mobil yang tercatat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang adalah mobil penumpang, mobil beban, mobil bus, sepeda motor, becak motor. Berdasarkan data Dinas Perhubungan jumlah kendaraan pada tahun 2004 sebanyak 7.959 buah kendaraan, dibanding pada tahun 2003 hanya 7.314 buah

kendaraan. Untuk jenis kendaraan mobil penumpang pada tahun 2003, jumlah kendaraan mobil penumpang sebanyak 704 kendaraan dan pada tahun 2004 naik menjadi 863 kendaraan. Jumlah kendaraan mobil beban mengalami penurunan dimana pada tahun 2003 sebanyak 274 buah dan pada tahun 2004 hanya 352 buah kendaraan. Mobil bus mengalami peningkatan 39 buah pada tahun 2003 dan 161 buah kendaraan pada tahun 2004. Untuk jenis kendaraan sepeda motor, terjadi lonjakan yang cukup drastis, pada tahun 2003 kendaraan roda dua hanya 6.277, sedangkan pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 6.5597 buah kendaraan.

d. Pariwisata

Arah kebijakan sektor pariwisata dengan penataan berbagai tempat wisata yang ada di Kabupaten Enrekang. Objek wisata yang sudah ada maupun yang belum dilakukan akan diupayakan dengan berbagai promosi wisata dengan memanfaatkan travel wisata. Terdapat kurang lebih 29 objek wisata yang dapat dikembangkan mulai dari lokasi panorama alam, air terjun, kuburan kuno.

Berdasarkan data kunjungan pada berbagai objek wisata di Kabupaten Enrekang kunjungan ke lokasi wisata masih didominasi oleh wisatawan lokal, pada tahun 2004 tercatat sebanyak 2.757 orang mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2003 sebesar 2.432 orang, sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun 2003 sebesar 348 orang kunjungan, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2004 sebesar 442. Akan tetapi sangat jauh penurunannya bila dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2002 sebesar 905 orang. Rendahnya jumlah kunjungan karena berbagai kendala seperti penataan yang kurang bagus dan promosi keluar belum optimal

sehingga perlu ada solusi untuk menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kab. Enrekang.

3.5.3. Program Pengendalian Dampak Lingkungan

Dalam era otonomi dan desentralisasi sekarang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang diperhadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan untuk mampu berkreasi, membangun inisiatif dalam rangka membangun masyarakat madani yang demokratis menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta melindungi kelestarian lingkungan hidup. Dibalik peluang dan tantangan, kenyataan bahwa faktor pendorong masih perlu dimobilisasi dengan baik karena pada kenyataannya pula faktor penghambat justru nampak lebih dominan.

Pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun awal otonomi berada pada situasi yang sangat rentan pada gejolak sosial kemasyarakatan yang sewaktu-waktu dapat saja muncul kepermukaan oleh berbagai sebab yang sesungguhnya sangat sederhana penanganannya namun karena sejak awal tidak ditangani dengan baik akhirnya menjadi rumit dan tidak terkendali. Persoalannya terletak pada kepentingan individu dan kelompok yang dikedepankan sementara kepentingan umum justru diabaikan. Secara bijak kita masih dapat memahaminya karena selain kita berada pada masa transisi dari pemerintahan sentralistik ke pemerintahan desentralistik kita juga sedang mencari bentuk demokratisasi yang seirama dengan era keterbukaan dan globalisasi.

a. Isu-isu Lingkungan

Degradasi hutan, penggunaan lahan pada hulu daerah aliran sungai, banjir dan kekeringan, erosi dan sedimentasi menyebabkan

mengancam kelestarian lingkungan hidup yang setiap saat akan mengancam usaha dan keselamatan masyarakat sekitarnya.

Masalah sampah yang belum mampu ditangani secara tuntas dan pelayanan air bersih masih belum memuaskan, merupakan masalah – masalah tersebut diatas merupakan tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Kebijakan pelestarian lingkungan diperhadapkan dengan pembangunan ekonomi. Gambaran perekonomian Kabupaten Enrekang sesungguhnya menunjukkan angka relatif cukup baik apabila dilihat dari perkembangan PDRB. Selama kurun waktu 1998 - 2003, PDRB Kabupaten Enrekang mengalami perkembangan rata-rata sebesar 3,46 kali lipat dimana pada tahun 1993 nilainya adalah sebesar 99,76 milyar dan tahun 2003 naik menjadi 587,356 milyar. Namun bila dibandingkan dengan PDRB Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan 1,46 kali maka secara relatif dapat dikatakan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Enrekang lebih lambat dan termasuk dalam urutan ke 17 dalam wilayah Sulawesi Selatan. Sekalipun pertumbuhan ekonomi ini cukup menggembirakan namun belum memperluas kesempatan kerja. Struktur ekonomi relatif menunjukkan fungsinya sebagai kabupaten agropolitan.

Dilain pihak, penerapan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih diperhadapkan dengan kendala operasional, perbedaan persepsi diantara penegak hukum dan berbagai kendala lainnya.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya mengelola pembangunan kota yang terarah, efisien, dan memenuhi harapan masyarakat yang diringi suatu pengelolaan manajemen pertumbuhan kota yang arif dan bijaksana dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat sebagai pilar pembangunan.

Semakin berkembangnya masalah-masalah lingkungan, tidak dapat dihindari bahwa masalah lingkungan justru semakin terangkat kepermukaan baik disebabkan akumulasi persoalan-persoalan lingkungan yang berakar dari 20 - 30 tahun yang lalu ataupun masalah lingkungan yang terjadi sekarang ini. Banjir yang sering terjadi baik di kota maupun pada daerah DAS Bila menjadi masalah Kabupaten Enrekang sesungguhnya akibat berbagai kebijakan pembangunan 20 – 30 tahun yang lalu yang mengabaikan fungsi lingkungan hidup. Sampah selalu menjadi persoalan rutinitas keseharian. Kapasitas penanganan sampah hanya oleh Pemerintah Kabupaten hanya berkisar 35,63 % saja. Artinya setiap hari 64,37 % sampah yang tidak terangkut. Selain itu sistem pembuangan open dumping membawa persoalan tersendiri, bahkan sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah. Pemindahan sampah dari TPS ke TPA sesungguhnya hanya menangani sampah pada wilayah kota dan beberapa wilayah kecamatan sementara sampah yang terbangun di TPA menjadi permasalahan tersendiri.

b. Evaluasi Kebijakan

- Umum

Langkah langkah kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan umum yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Arah kebijakan dituntun oleh visi dan misi, strategi pelaksanaan tersusun secara sistematis dalam

program program strategik yang diperkuat dengan rencana tindak yang senergis antar berbagai program pembangunan. Sungguhpun demikian, pada pelaksanaan masih diperhadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan terutama dalam tahun-tahun awal pelaksanaan otonomi. Tiga hal yang menjadi kendala utama adalah keterbatasan peraturan perundang-undangan, rendahnya SDM aparat selaku fasilitator, regulator pembangunan dan kemasyarakatan serta kendala ketiga sikap dan perilaku masyarakat yang belum sesuai dengan tuntutan otonomi dan desentraliasi.

Keterbatasan peraturan perundang-undangan menjadi kendala mendasar, terutama penjabaran dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena keterbatasan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran UU 22/99 menjadi persoalan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan publik yang bersumber dari UU dimaksud. Sementara disisi lain sudah sangat mendesak penjabarannya dalam bentuk PERDA yang mendorong terbentuknya jiwa dan semangat otonomi baik terhadap aparat pemerintah maupun terhadap masyarakat pada umumnya. Kalaupun ada berbagai PP sebagai penjabaran dari UU 22 / 99 hanya sebagian yang memfasilitasi pelaksanaan otonomi pada Kabupaten, sementara sebagaian lagi justru memperkuat posisi Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom dibanding posisi Pemerintah Kabupaten, bahkan sadar atau tidak lebih memperkuat posisi dan kewenangan Pemerintah Pusat.

Kualitas SDM aparat memang masih perlu perhatian serius menanganinya. Bukan hanya dari sisi meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan, tapi lebih kepada bagaimana mendesain pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan nyata

(kondisi dan situasi) bagi kurang lebih 1.084 pegawai agar mampu menjadi aparat yang membangun good governance. Mendesain pelatihan menjadi lebih sulit lagi karena struktur organisasi pemerintahan yang terkesan tidak efisien dan efektif karena luasnya bidang tugas dengan kompetensi yang sangat bervariasi. Oleh karenanya masih sulit diharapkan dalam waktu yang singkat, SDM aparat yang mampu berperan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi.

- Kebijakan Lingkungan Hidup

Penerapan kebijakan lingkungan hidup berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 1997 diperhadapkan pada berbagai persoalan mendasar. Kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum diterapkannya Undang Undang 18 Tahun 1982. Artinya kerusakan dan pencemaran yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya yang diakibatkan kebijakan Pemerintah Pusat kemudian dengan otonomi dan desentralisasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan prinsip bahwa pemulihan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup justru lebih lama (untuk menghindari istilah tidak mungkin) dari waktu yang dibutuhkan dalam proses pengrusakan dan pencemaran itu sendiri, maka kebijakan lingkungan hidup melingkup rentang waktu yang cukup panjang, itupun dengan optimisme yang tinggi. Oleh karena itu belum waktunya melakukan evaluasi. Bahkan lebih dari pada itu, bukan pada tempatnya “menuduh” Pemerintah Daerah tidak mampu menangani masalah lingkungan atau bahkan tidak pada tempatnya mengangkat persoalan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Enrekang semata.

- ***Kebijakan Tata Ruang***

Ada dua hal utama yang seharusnya menjadi paradigma dalam penyusunan tata ruang pada berbagai tingkat/skala perencanaan, yang sering tidak menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana. Pertama adalah paradigma lingkungan hidup dan kedua adalah paradigma otonomi. Kedua paradigma ini tidak tampil secara meyakinkan dalam metodologi perencanaan. Upaya pengelolaan keruangan berdasarkan rancangan tata ruang sungguh telah mengupayakan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) namun jika paradigma pertama digunakan sebagai salah satu acuan maka wujud perencanaan tata ruang akan menjadi lebih komprehensif dan menghasilkan rencana pembangunan dan pengelolaan keruangan serta mendorong dinamika aktivitas masyarakat yang lebih sustainable. Metodologi perencanaan tata ruang khususnya tata ruang propinsi masih menggunakan model sentralisasi, yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan hirarki pusat-pusat pertumbuhan. Model ini akan memberikan *pressure* (tekanan) terhadap tumbuh dan berkembangnya suatu kawasan secara mandiri. Konsep ini bertolak belakang dengan prinsip otonomi dan desentralisasi yang memberikan kewenangan penuh terhadap daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan model perencanaan baru dengan memperhatikan kedua paradigma dimaksud. Tata ruang Kabupaten Enrekang telah disusun sejak tahun 2000 dan telah dilakukan *up dating* dan revisi pada periode waktu tertentu.

Kebijakan tata ruang pada masa itu sekalipun tidak/belum menggunakan paradigma lingkungan dan otonomi namun telah mampu mengakomodir masalah yang tumbuh dan berkembang, namun kebijakan ini diperhadapkan dengan berbagai kebijakan lain yang mengakibatkan diabaikannya kebijakan tata ruang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebijakan penetapan target PAD baik pajak daerah dan terutama retribusi daerah terhadap perijinan menenggelamkan kebijakan tata ruang ke dasar sungai yang paling dalam. Target retribusi menjadi lebih diutamakan dibanding dengan ketaatan terhadap kebijakan tata ruang. Kinerja aparat dinilai terhadap kemampuan memperoleh PAD melebihi target yang ditetapkan dibanding dengan kinerja dan kemampuan aparat menjaga agar rencana fungsi utama masing-masing kawasan tidak berubah. Oleh karena itu sangat mudah diukur deviasi pelaksanaan terhadap perencanaan yang sekalipun berkali kali dilakukan revisi dan up dating namun permasalahannya bermuara pada semakin rendahnya kapasitas lingkungan hidup di daerah ini. Indikasi ini menunjukkan bahwa jika seandainya dianalisis lebih mendalam maka kerusakan lingkungan sesungguhnya berawal dari kebutuhan pendapat daerah yang terjadi sejak 30 tahun yang lalu.

- Kebijakan Sosial Ekonomi

kebijaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam bentuk program-program terpadu dengan skala prioritas dan disesuaikan dengan pengwilayahan komoditi serta berpedoman pada arah pembangunan daerah jangka panjang.

Tujuan utama pembangunan bidang ekonomi dengan terciptanya struktur ekonomi daerah yang berimbang antara sektor pertanian dan kegiatan sektor perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terutama

sub sektor pertanian tanaman pangan untuk menunjang program swasembada pangan regional dan nasional, disamping program diversifikasi kegiatan usaha pertanian lainnya seperti sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, berdasarkan perwilayahan komoditi

Pelaksanaan program pengwilayahan komoditi yang diikuti upaya pelestarian lingkungan hidup, serta efisiensi perencanaan pembangunan melalui program penataan ruang wilayah menuju penertiban dan efektifitas penanganan/pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan pembangunan, selain pertimbangan sektoral tetap memperhatikan pertimbangan wilayah/daerah yang mengarah pada pengelolaan sumber daya yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, terjalinnya keserasian dan keseimbangan laju pembangunan dan pertumbuhan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan melalui pendekatan pengembangan wilayah, ke dalam sub wilayah pembangunan yang diikuti dengan program pengembangan komoditi tertentu sesuai dengan kriteria-kriteria lahan yang cocok bagi pengembangan komoditi. Melalui pembagian wilayah ke dalam sub wilayah pembangunan sebagai wujud tata ruang wilayah, diharapkan sub-sub wilayah pembangunan dengan pusat pengembangan dapat berperan sepenuhnya sesuai fungsi yang diemban, untuk menarik dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam wilayah pengaruhnya, secara bersama-sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya dapat menunjang terlaksananya program dan cita-cita pembangunan nasional, sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB 4

TINDAK LANJUT

Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam kerangka proses pembangunan dengan memperhatikan keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta sebab akibatnya. Model pembangunan yang diharapkan dalam era otonomi dan desentralisasi adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dengan pembangunan lingkungan. Pembangunan ekonomi tetap dibutuhkan namun kelestarian fungsi lingkungan harus tetap dijaga sambil memulihkan lingkungan yang telah mengalami degradasi.

Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk meminimalkan penyebab kerusakan lingkungan sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin, namun upaya pemulihan dan mempertahankan fungsi lingkungan hidup diperhadapkan pada kendala belum berfungsinya dengan baik dan atau kurangnya peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak efektif. Sedangkan disisi lain masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan sehingga ikut memperburuk fungsi lingkungan hidup.

Untuk memperoleh lingkungan yang layak, setiap orang wajib ikut ambil peduli terhadap masalah, persoalan dan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Komitmen ini dapat ditindaklanjuti melalui:

1. Mengatasi Pemanfaatan Tata Ruang secara optimal

Pada prinsipnya semua kegiatan pembangunan seyogyanya mengacu kepada kebijakan tata ruang agar tujuan yang diharapkan yakni peningkatan pelayanan publik dalam ruang yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemanfaatan ruang dengan memasukkan parameter-parameter lingkungan sebagai dasar penentuan kawasan perlindungan, kawasan produksi, kawasan pemukiman dan lainnya. Proses ini dapat diawali dengan perubahan sistem pemetaan sektoral kepada pemetaan dasar pemanfaatan ruang, akurat dan terpadu. Pemetaan dasar kemudian diumumkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk dijadikan acuan pemanfaatan ruang secara tegas dan dipatuhi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat secara terintegrasi dan dilaksanakan bersama-sama.

2. Merehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Kontinu

Kondisi lahan dan kawasan hutan sudah sangat memprihatinkan sehingga sebagai komponen masyarakat baik individu maupun kelompok, sadar atau tidak sadar mampu memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian lingkungan hidup. Rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan dan lahan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien agar fungsi sumber daya hutan dan lahan serta perannya sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dapat ditempatkan sesuai dengan fungsinya untuk kesejahteraan manusia. Program yang lebih prioritas akan dilaksanakan lebih awal menyusul program yang lainnya, sehingga ada kesinambungan ke arah perbaikan kondisi lingkungan yang lebih kondusif.

Seperti pembuatan jalur hijau, hutan kota, program langit biru dan program kali bersih. Peran aktif seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan demi tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Penegakan Supremasi Hukum

Dalam pasal 6 ayat 1 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa *“setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”*.

Sosialisasi hukum harus diikuti dengan penegakan hukum berupa pemberian sanksi, yaitu sanksi administratif yang meliputi: pemberian teguran keras, pembayaran uang paksaan, penangguhan berlakunya izin dan bahkan pencabutan izin. Sanksi perdata diberikan karena pencemar atau perusak yang telah mencemarkan atau merusak lingkungan sehingga lingkungan harus dipulihkan kembali. Sanksi pidana dikenakan sesuai dengan pertimbangan penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa) setelah melalui tahapan pemberian sanksi administratif dan sanksi perdata (sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1997). Di sisi lain sebagai masyarakat atau pribadi yang menyadari tentang arti pentingnya lingkungan hidup harus mampu menunjukkan rasa tanggung jawab dan percaya diri untuk mengambil sikap demi menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Prilaku inilah yang menjadi tumpuan dan panutan hukum dan perundang-undangan, sehingga segala penyebab kerusakan dapat diminimalkan tanpa berurusan dengan pihak yang berwajib.

4. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat

Kondisi daerah yang penduduknya tergolong padat adalah suatu modal untuk memberdayakan diberbagai sektor kehidupan. Salah satu solusinya adalah pemerintah sebagai motivator dan fasilitator khususnya pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya, sehingga masyarakat perlu mendapat perhatian

dari berbagai aspek untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungannya. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang baik dan holistik antara masyarakat, pemerintah maupun swasta. Upaya itu dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya membudayakan sikap malu membuang sampah di sungai atau membakar sampah yang dapat menyebabkan pencemaran udara, memelopori gerakan *green consumerism* untuk menolak konsumsi produk yang mencemari lingkungan, menggalang gerakan menanam pohon pada bantaran-bantaran sungai untuk pencegahan bahaya erosi atau lomba kebersihan lingkungan mulai dari tingkat desa/kelurahan. Kegiatan inilah merupakan wujud respon masyarakat terhadap kepedulian akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dari segala aspek kehidupan.

5. Pemantauan Lingkungan Hidup Secara Berkala

Setiap elemen lingkungan termasuk komponen masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kepedulian lingkungan hidup, sehingga wujud dan kelestarian lingkungan hidup dapat dinikmati oleh seluruh komponen hidup dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Prilaku ini perlu ditopang dengan kegiatan yang dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut adalah mengadakan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sehingga komponen dan parameter lingkungan dapat diketahui mengenai peningkatan kualitas lingkungan atau terjadi penurunan (degradasi) secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdep KLH, 2006., " Pedoman Umum Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006.
- BPS, 2005., "Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2004/2005" kerjasama Bappeda Kab.Enrekang dengan Biro Pusat Statistik.
- Bappeda, 2000., "Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang".
- Bapedalda, 2004., " Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Sulawesi Selatan".
- Distamben, 2005., " Potensi Bahan Tambang Unggulan Kabupaten Enrekang " .
- Dinas Tata Ruang dan LH, 2005., " Buku I Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang".
- Dinas Tata Ruang dan LH, 2005., " Project Concept Paper Proposal Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Penanggulangan dan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Sub DAS-BILA Kabupaten Enrekang " .
- Dinas Tata Ruang dan LH, 2005., " Buku II Basis Data Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang " .
- Dinas Tata Ruang dan LH, 2004., "Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2004 ~ 2008"

....., 2004., " Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kabupaten Enrekang.

....., 2004., " Rencana Tata Ruang Pengembangan Komoditas Andalan (Berorientasi Agropolitan) Propinsi Sulsel-Kab.Enrekang.

LAMPIRAN:

Foto-Foto Kegiatan Hasil Survey Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di Kabupaten Enrekang 2006.



Foto 1.

Daerah yang berpotensi rawan kebakaran di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang (Posisi Koordinat: $03^{\circ}18'11.0''\text{LS}$ - $119^{\circ}49'25.5''\text{BT}$)



Foto 2.

Kondisi lahan pertanian yang dapat menimbulkan erosi di daerah lereng dan perbukitan yang terletak di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang



Foto 3.

Kawasan penambangan secara liar tanpa mengindahkan dampak lingkungan yang ditimbulkan terletak di Kecamatan Alla Kab. Enrekang. (Posisi Koordinat: $03^{\circ}19'04,3''\text{LS}$ - $119^{\circ}48'38,3''\text{BT}$)



Foto 4.

Kawasan penambangan yang tidak terkendali akan merusak lingkungan sehingga perlu penanganan secara dini agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.



Foto 5.

Kondisi areal perbukitan yang masih bagus perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya, kawasan ini terletak di Kecamatan Baraka Kab. Enrekang (Posisi Koordinat: 03°23'12.3"-119°53'14.5").



Foto 6.

Lahan yang masih kosong perlu mendapat perhatian secara serius dari segala komponen khususnya pemerhati lingkungan.



Foto 7.

Daerah yang berpotensi dan rawan bahaya kebakaran terletak di Kecamatan Baraka Kab. Enrekang.



Foto 8.

Sampah dapat merusak lingkungan bila tidak dikelola dengan baik, perlu kesadaran dari berbagai pihak tentang lingkungan yang sehat dan bersih.



Foto 9.

Salah satu daerah aliran sungai yang dijadikan areal tambang pasir, dampak kegiatan tersebut menimbulkan tingginya kekeruhan sehingga dapat mengganggu ekosistem perairan.



Foto 10.

Salah satu kegiatan dari pembukaan lahan baru dengan sistem tebas-bakar, kegiatan ini dapat menimbulkan erosi dan longsor.